



**FAKULTAS
HUKUM**

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

**Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 122/UN11.F3/KPT/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Nomor 704/UN11.F3/HK.02/2025 tanggal 11 Februari 2025, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
9. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1537/UN11/KPT/2024 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Rektor Kepada Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala;
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 547/UN11/KPT/2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2025 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Februari 2025

a.n. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum
NIP 196504051991021001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
 NOMOR 122/UN11.F3/KPT/2025, TANGGAL 13 FEBRUARI 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Nama/NIP/NIPK	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Panitia	Rincian Tugas	Tugas dan Fungsi
1	Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum 196504051991021001	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Dekan Fakultas Hukum	Pengarah	Memberikan arahan	Ya
2	Prof. Dr. Efendi, S.H., M.Si 196712071993031002	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum	Penanggung Jawab	Memberi saran dan masukan	Ya
3	Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. 196806141994032002	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan Fakultas Hukum	Ketua	Memberi saran dan masukan	Ya
4	Syamsul Bahri, S.H.I., M.A. 197911152008121001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum	Wakil Ketua	Memberi saran dan masukan	Ya
5	Dr. Muazzin, S.H., M.H 197002081998021001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Kepala Departemen Ilmu Hukum	Sekretaris	Mengkoordinir Tim dan finalisasi	Ya
6	Khairani, S.H, M.Hum 196703221993032001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Sekretaris Departemen Ilmu Hukum	Anggota	Membantu dalam proses finalisasi	Ya
7	Arsyati, S.E., M.Si. 197010122002122001	Pembina (Gol. IV/a)	Kepala Subbagian Umum dan Sumber Daya Fakultas Hukum	Anggota	Menyusun draft Renstra	Ya
8	Dedy Yuliansyah, S.H., M.H. 198807092019031011	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Asisten Ahli	Anggota	Mempersiapkan data dukung IKU, IKT dan IKK	Ya
9	Fathin Abdullah, S.H., M.H. 199603042024061002	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Tenaga Pengajar	Anggota	Mempersiapkan data dukung akademik dan kemahasiswaan	Ya
10	Risa Suyani, S.E. 197406262000032001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum	Anggota	Mempersiapkan data dukung keuangan	Ya
11	Muhammad Reza, A.Md 199111232017011101	-	Pengelola Informasi Akademik	Anggota	Mengedit draft Renstra	Tidak

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 13 Februari 2025

a.n. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum
 NIP 196504051991021001

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Dinamika Lingkungan Internal	1
1.1.2 Dinamika Lingkungan Eksternal	19
1.1.3 Capaian Rencana Strategis FH USK 2020-2024	24
1.2 Permasalahan dan Potensi.....	26
1.2.1 Permasalahan	26
1.2.2 Potensi.....	28
1.2.3 Analisis Masalah dan Potensi	48
1.2.4 Analisis Peluang dan Tantangan	51
1.2.5 Penjabaran Kinerja dan cascading FH USK	52
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	55
2.1 Visi dan Misi.....	55
2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	55
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	59
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	63
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	63
3.2 Kerangka Regulasi.....	67
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	69
3.3.1 Struktur Organisasi	69
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	81
4.1 Target Kinerja	81

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH USK) periode 2025-2029. Dokumen ini disusun sebagai panduan utama dalam perencanaan dan pengembangan jangka menengah Fakultas, sejalan dengan visi FH USK untuk menjadi fakultas unggul dan berdaya saing global dalam memajukan ilmu pengetahuan di bidang Hukum.

Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025-2029 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2020-2024. Rencana Strategis Fakultas Hukum 2025-2029 ini dibuat berdasar kepada Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2025-2029.

Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025-2029, merupakan arah pengembangan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sampai dengan 2029 dan digunakan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Tahunan Renstra Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Proses penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemangku kepentingan internal hingga mitra eksternal, guna memastikan bahwa setiap langkah strategis yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan, potensi, serta harapan masyarakat. Renstra ini juga menjadi wujud komitmen FH USK dalam menjalankan tata kelola fakultas yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mandiri dan profesional.

Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Harapan kami, RENSTRA FH USK 2025-2029 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam mengembangkan potensi fakultas, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Banda Aceh, 14 April 2025
Dekan,

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.
NIP. 196504051991021001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Dinamika Lingkungan Internal

a. Akademik

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH-USK) merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Berdiri pada tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 11 Tahun 1961, tertanggal 21 Juni 1961. Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) FH-USK terakreditasi dengan peringkat akreditasi UNGGUL, berdasarkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4679/SK/BAN-PT/Ak- KP/S/VII/2022 Tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Universitas Syiah Kuala, tanggal 26 Juli 2022. FH-USK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk kebutuhan lokal, regional, nasional maupun global. FH-USK berkomitmen untuk mengutamakan mutu, mengintegrasikan nilai-nilai universal, nasional, dan lokal untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki keselarasan antara IPTEK dan IMTAQ. Keseimbangan diantara keduanya menjadi komponen utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti, menjunjung tinggi etika, estetika serta berakhlak mulia.



Gambar 1.1 Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Fakultas Hukum USK melakukan strategi-strategi terbaik untuk memberdayakan semua potensi sumber daya yang dimilikinya untuk menjadi Fakultas yang mampu menghasilkan lulusan memiliki daya saing sebagaimana yang terdapat dalam visi misi Fakultas Hukum USK. Potensi sumber daya ini menjadi kekuatan untuk meraih peluang dalam menghadapi ancaman dan tantangan eksternal.

Saat ini, FH-USK telah memiliki 4 (empat) program studi, yaitu Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, dan Program Studi Magister Kenotariatan.

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum FH-USK terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Administrasi Negara, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Internasional serta Bagian Kelas International. Dalam upaya pengembangan kemampuan dan keterampilan mahasiswa bidang praktik hukum, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum FH-USK memiliki Laboratorium dan Klinis Hukum, yang berkonsentrasi pada pendidikan dan latihan kemahiran hukum (PLKH).

b. Sumber Daya

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sekarang ini memiliki 96 (sembilan puluh) orang tenaga pendidik dengan kualifikasi akademik sebagai berikut:

Jenjang	Non Fungsional		Asisten Ahli		Lektor		Lektor Kepala		Guru Besar		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L/P
S2	4	6	3	5	14	12	8	2	0	0	L=29
											P=25
											54
S3	0	0	0	0	4	3	16	3	16	0	L=36
											P=6
											42
Total	4 (4,17)	6 (6,25)	3 (3,13)	5 (5,20)	18 (18,75)	15 (16,63)	24 (25,00)	5 (5,20)	16 (16,67)	0	96 (100)

Jumlah dosen yang melanjutkan S3 sebagai berikut :

Dosen	S3	S2	Sedang Pendidikan S3	Belum S3
Laki-laki (65)	36	30	10	20
Perempuan (31)	6	24	5	19
Total	42	54	15	37

Tenaga kependidikan yang menjadi penunjang utama proses pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala saat ini berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari Pustakawan 2 (dua) orang, dan staf administrasi 30 (tiga puluh) orang.

Jenjang	SLTA	D3/D4	S1	S2	Total
Administrasi	1	8	20	1	30
Pustakawan	0	1	1	0	2
Total	1	9	21	1	32

Manajemen sumber daya manusia (Human Resource Management) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, merupakan prioritas yang utama untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan yang diberikan dan berdampak pada mutu lulusan yang dihasilkan. Maka untuk menunjang pesatnya perkembangan di dunia pendidikan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala melakukan motivasi yang maksimal bagi seluruh SDM nya baik dari proses kenaikan pangkat, studi lanjut maupun berbagai kesempatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik Dosen dan tenaga kependidikannya. Berikut sertifikasi pelatihan yang dimiliki dosen FH USK.

No.	Nama Dosen	NIDN/NIDK	Jenis Sertifikasi yang Dimiliki	Lembaga Penyelenggara Sertifikasi	Link Web
1	Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.	0020127401	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/19sSTVIFhE3bVeRPxwUpUfNnSIMZXIfi7/view?usp=drive_link

2	Dr. Dahlan, S.H., M.Hum.	0004046703	CPAM	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1hFs87RxDX4BksB34AheB-N-ifdS-qwyN/view?usp=drive_link
3	Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum.	0014066804	Mediator Konsiliator	LSP JIMLY (Jasa Integrasi Mediator Legal Yustisia)	https://drive.google.com/file/d/1-JTRhwKYqAgCyx43DnEqyDk5nqTZpPIQ/view?usp=drive_link
4	Kadriah, S.H., M.Hum.	0001016703	Mediator Konsiliator	LSP JIMLY (Jasa Integrasi Mediator Legal Yustisia)	https://drive.google.com/file/d/1cIINFgVoVFVOKT1iJAPzCN6DumxC5cUM/view?usp=drive_link
5	Rismawati, S.H., M.Hum.	0009106701	Mediator Konsiliator	LSP JIMLY (Jasa Integrasi Mediator Legal Yustisia)	https://drive.google.com/file/d/1mnmfJRUnkutK6EJmef6Fyo6-INfLT0aL/view?usp=drive_link
6	Susiana, S.H., M.H.	0028018102	Mediator Konsiliator	LSP JIMLY (Jasa Integrasi Mediator Legal Yustisia)	https://drive.google.com/file/d/1_w8h8ZV89-sAsQ6GGuYkSbTLyJOM0boY/view?usp=drive_link
7	Intan Munirah	0011018905	PBJ	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
8	Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.	0112077705	Legal Drafting	LSP JIMLY (Jasa Integrasi Mediator Legal Yustisia)	https://drive.google.com/file/d/16CBqryvMAAoFu2xB6MXUH7OGn-Yn95GH/view
9	Mukhlis, S.H., M.Hum.	0021046803	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1y2fpTt6_X7nPCxYaNkW-phOILC6KU8lw/view
10	Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.	0005046503	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	
11	Nurdin MH, S.H., M.Hum.	15096601	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1Q4dDp9tkTJ7EY0nbEMcqhxEAdxg4eEfm/view

12	Dr. Darmawan, S.H., M.Hum.	0025056202	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1c4eqN-FulobcwjWLS76E06Xu8cHhF7ll/view
13	Dr. Muazzin, S.H., M.H.	0008027001	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1Yjaeu3BDm0vaEAv0EPMiPIV92nZUpuQ7/view
14	Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.	0005097907	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1H4DrEfr0ugbPeljs1H9uuyYS2QDzyZDN/view
15	Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum.	0008127002	Mediator Konsiliator	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	https://drive.google.com/file/d/1aFOArJP2ZYeAxdYmB0sjAPizgvk4NrFJ/view
16	Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.	1330058905	Mediator Konsiliator	PKPA	https://drive.google.com/file/d/181BuxFcUUaVnIE53Ezo8Ww-mviAymvgv/view
17	Dedy Yuliansyah, S.H., M.H.	0009078805	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1nFfVCmla7D_chS5S4gp_7DjPTVssocn/view
18	Dr. Ria Fitri, S.H., M.Hum.	0021016601	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1zkRQD1-Xrsh10gDGTJma57Ornmmcw1ia/view
19	Rosmawati, S.H., M.H.	0020108002	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1db8Ha7pzi6SRAdIUaa_vwCKESiwoOiLR/view

20	Abdurrahman S.H., M.Hum.	29056501	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1rIQ-DICobfSBCuPeWqu077cYrJpP_ret/view
21	Aldisa, S.H., M.H.	00015079105	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1TZrVi6YGUyP2g2xC-qdKtKfLksocs0TE/view
22	Anta Rini Utami, S.H., M.H.	0024128601	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/17Pc2VOIST4Rsi2vRUUcqosn56ol-AUm/view
23	Basri Effendi, S.H., M.Kn., M.H.	21048309	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/16OjMmZZOGVNFSoLCRSgh2-bq5wxNAfSi/view
24	Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H.	3038603	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/18FPY5Zd52oNXF3ftF1ID-gC_6wmqmilu/view
25	Dr. Ida keumala Jeumpa, S.H., M.H.	0008116801	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1YtFurE7CxnidGXvqjZ700Pei8o12sfwl/view
26	Lena Farsia, S.H., L.L.M.	0005057503	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1TOc-9E0IRPsjYHAEQbmFUuvKgR47RuGy/view
27	Lia Sautunnida, S.H., L.L.M.	0016048604	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1Unjv9rHhyVLQUkfwLerk-6BvaeWW3XW/view
28	Mahfud, S.H., L.L.M.	0015048002	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1N67FmsgRW6Kh31wcpCA2IcKil8fbqye/view

29	Mirja Fauzul Hamdi	0001028803	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1rAmS6kGobSsU7aDyiGvKTy0lxKI2G8lt/view
30	Mustakim	0030127201	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1Uc7sMyX-MC9Q26UZ5ehRHwltaqLfsmtL/view
31	Nurhafifah	0009107701	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1lpNx34P6-11BWOkpB4mFRxarCOlh0FWG/view
32	Syamsul Bahri	15117906	Mediator	Institut Pengadaan Publik Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1NBADmJNBkQaF0_ikhOChSCd1NqweQGFy/view?usp=drive_link
33	M Iqbal	18058001	Editor	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	https://drive.google.com/file/d/1q3iXRZj2HCQijl_ycu3PbscE5h-5gt4l/view?usp=sharing
34	Nellyana Roesa, S.H., LL.M.	4017401	Editor	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	https://drive.google.com/file/d/1_T1k_yRtlliAabQO6m8QoMjBTotVHnAs/view?usp=drive_link
35	Khairil Akbar	17049105	Editor	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	https://drive.google.com/file/d/18yxqPCGkZACjrd8nX3INR0hkQ8Yqd2X/view?usp=drive_link
36	M Ya'kub Aiyub Kadir	7067710	Editor	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	https://drive.google.com/file/d/1_ksU_LV9-K9_kpPvWxwTC33yhyAdlgv/view?usp=drive_link

c. Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dilaksanakan melalui sistem penerimaan yang ditetapkan oleh Universitas Syiah Kuala. Biro akademik USK berkoordinasi langsung dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik dalam melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa baru yaitu:

- a) Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Prestasi Perguruan Tinggi Negeri (SNPMBPTN) untuk program studi strata S1;
- b) Seleksi Nasional Berbasis Tes Perguruan Tinggi Negeri (SNBTPTN) untuk program studi strata S1;
- c) Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) untuk program studi strata D3, DIV, S1, Pasca Sarjana, Spesialis, dan Profesi.

Pada tahun 2024 jumlah mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum USK berjumlah 2.339 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Tahun 2024

Angkatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2024	285	413	698
2023	234	317	551
2022	193	242	435
2021	176	215	391
2020	96	59	155
2019	62	19	81
2018	15	9	24
2017	1	0	1
2016	2	1	3
TOTAL	1064	1275	2339

Sumber: Portal Data USK Tahun 2024

Tabel 1.2
Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Berdasarkan Program Studi Tahun 2024

Jenjang	Fakultas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S1	Ilmu Hukum	860	1138	1998
S2	Ilmu Hukum	103	69	172
S2	Kenotariatan	47	54	101
S3	Ilmu Hukum	54	14	68
TOTAL		1064	1275	2339

Sumber: Portal Data USK Tahun 2024

Jumlah mahasiswa secara keseluruhan sebanyak 2339 orang memberikan kontribusi pendapatan bagi FH USK melalui UKT yang dibebankan kepada mahasiswa. Pendapatan tersebut digunakan untuk pembiayaan operasional pendidikan dan pemenuhan ketercapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK). Pendapatan yang diterima menunjukkan bahwa FH USK memiliki kemandirian dalam manajemen tata kelola untuk memenuhi ketercapaian IKU, IKT dan IKK. Namun demikian alokasi anggaran yang diberikan oleh USK untuk FH USK belum mampu membiayai kegiatan penelitian dosen dan akreditasi Internasional. Dana IPI yang diserahkan ke FH untuk perbaikan gedung masih membutuhkan dana tambahan dari USK, dikarenakan anggaran yang ada tidak mencukupi kebutuhan.

Proses Pembelajaran

Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulum dan proses pembelajaran. Hal-hal penting yang mendasari pengembangan Kurikulum yang menjadi kompetensi utama dan penunjang bagi lulusan Fakultas Hukum yang diharapkan stakeholder adalah sebagai berikut:

1. Titik berat pendidikan tetap ditujukan pada bidang keahlian hukum.
2. Ruang lingkup kegiatan kerja sarjana hukum sangat luas, meliputi: pengadilan, kejaksaan, kantor notaris, kantor pengacara, biro/kabag hukum, dan lain-lain.
3. Perkembangan ilmu hukum dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi, otonomi daerah, syariat Islam, perdagangan global,

4. Kemampuan komunikasi, argumentasi, presentasi, dan diskusi merupakan persyaratan seorang sarjana hukum.

Dalam sistem pembelajaran sebagian besar tenaga pendidik menggunakan LCD, bahkan sudah menggunakan fasilitas internet di ruang kuliah, sehingga dapat memberikan contoh-contoh perkembangan ilmu hukum dan kasus-kasus hukum terkini.

Metode diskusi juga diterapkan dalam perkuliahan. Untuk mata kuliah-mata kuliah tertentu, mahasiswa diminta untuk membuat karya ilmiah dan mempresentasikannya di depan kelas. Selama menyelesaikan pendidikannya, mahasiswa menjalani beberapa jenis aktivitas pembelajaran, yaitu: kuliah, seminar, kerja praktik (magang), penelitian dan menulis skripsi bagi mahasiswa S1, tesis bagi mahasiswa S2 dan Disertasi bagi mahasiswa S3.

Kegiatan kuliah mencakup tatap muka di kelas, tutorial/asistensi, ujian tengah semester dan ujian semester dengan jumlah tatap muka 16 (enam belas) kali per semester. Karena jumlah mahasiswa pada satu kelas tidak banyak, maka interaksi tenaga pendidik dan mahasiswa dapat berjalan dengan relatif baik. Sebagian tenaga pendidik sudah menggunakan teknologi internet untuk pelaksanaan tugas mengajar seperti komunikasi dengan mahasiswa, penyerahan tugas dan pelacakan informasi. Fakultas juga memfasilitasi jaringan internet dan ruang baca. Dengan tersedianya jaringan internet di ruang baca, maka tenaga pendidik dan mahasiswa dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran. Kegiatan ekstra-kurikuler yang dilakukan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum :

1. Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA)
2. Sanggar Seni Reusam
3. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al Ahkam
4. Asian Law Student Association (ALSA)
5. Badan Apresiasi Seni Mahasiswa (BASKOM)
6. Forum Komunikasi Aneuk Hukom (FORKAH)
7. Komunitas Peradilan Semu (KPS)
8. Haba Aneuk Hukoem (HaHoe)
9. Law Otomotive Area (LOA)
10. Komunitas Debat Fakultas Hukum (KDFH)
11. Olahraga
12. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
13. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Prestasi Mahasiswa

Pada tahun 2024 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala berhasil meraih prestasi di bidang akademik dan bidang non-akademik. Di bidang Akademik Mahasiswa FH USK berhasil meraih prestasi akademik untuk tingkat Lokal sebanyak 1 Penghargaan, Nasional 3 Penghargaan dan Internasional sebanyak 1 Penghargaan. Salah satunya menjadi Juara II dalam Lomba Musabaqah Syahril Qur'an BKS Wilayah Barat.



Kegiatan Alsa International Moot Court Competition (2024)

Selain pada bidang akademik, Mahasiswa FH USK juga mendapatkan beberapa penghargaan pada bidang Non-Akademik pada tingkat Nasional dan Internasional. Pada tingkat nasional berhasil meraih 4 Penghargaan dan 1 penghargaan untuk tingkat Internasional. Pada tingkat Nasional FH USK salah satunya menjadi Juara 1 Pidato Bahasa Inggris, dan untuk tingkat Internasional FH USK berhasil meraih Juara II pada Lomba Tilawatil Qur'an Internasional (International Qur'an Recitation Award – IQRA-USK).



Lomba Tilawatil Qur'an Internasional (International Qur'an Recitation Award – IQRA-USK) 2024

d. Penelitian

Pelaksanaan dharma penelitian unggulan pada Fakultas Hukum USK

No	Nama Dosen	Fakultas	Program Studi	Judul Artikel/Karya Ilmiah/Buku/ Produk Luaran Riset	Link data
A. KARYA TULIS ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN DALAM BENTUK					
Jurnal Internasional Bereputasi					
1	Lia Sautunnida	FH	Ilmu Hukum	Dispute Resolution Mechanisms in Personal Data Leakages: An Analysis of OJK's Role and Functions in Indonesia	https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/21102
2	Efendi, M. Zuhri	FH	Ilmu Hukum	Environmental Protection for Sustainable Development: A Study of the Pilkada Debate in Aceh from a Legal Policy Perspective	https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/25890

3	Azhari Yahya, Dahlan	FH	Ilmu Hukum	Principles of Good Faith in the Reimbursement of Expenses within Oil and Gas Revenue Sharing Agreements in Indonesia	https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/14632
4	Teuku Muttaqin Mansur, Muazzin, M Adli Abdullah	FH	Ilmu Hukum	Mediating Tradition: The Role of Law Enforcement in Customary Law Disputes	https://journal.scandindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/1921
5	Yanis Rinaldi	FH	Ilmu Hukum	Local Government's role in Aceh's sharia banking transition: legal and institutional perspectives	https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legaliti/article/view/39419
6	Eddy Purnama, M. Gaussyah, Mahdi Syahbandir	FH	Ilmu Hukum	Participants' Reconceptualization of Asymmetric Legislative General Election in Indonesia	https://sdgsreview.org/LifestyleJournal/article/view/3476
7	Azhari Yahya	FH	Ilmu Hukum	Empowering Local Workers To Resolve Social Conflicts In West Aceh District's Palm Oil Sector	https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnallUS/article/view/1637
8	Sanusi, Azhari, Ilyas	FH	Ilmu Hukum	Legal Protection of Traditional Cultural Expressions in Aceh: A Comparative Legal Analysis of Islamic Law and Positive Law in Indonesia	https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/al-istinbath/article/view/12526
Jurnal Nasional Berbahasa Inggris/Bahasa Resmi PBB terindeks DOAJ					
1	Dedy Yuliansyah, M. Iqbal, Rizky Aulia Fitri	FH	Ilmu Hukum	Fulfillment of employment social security rights as an employer's legal obligation toward workers	https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/398
Prosiding internasional dalam internasional					
1	Darmawan, Iman Jauhari, Suhaimi			Integration Of Land Dispute Resolution Between Land Agencies And Traditional Apparatus In Aceh	https://proceedings.unimal.ac.id/micolls/article/view/1050
2	Mahdi Syahbandir			Proceedings of the 1st Joint International Conference on Social and Political Sciences: Challenges and Opportunities in the Future (JICSPS 2023)	https://www.atlantispress.com/proceedings/jicsps-23/126007792

3	M. Gaussyah, Mohd. Din			Proceedings of the 1st International Conference on Social Environment Diversity (ICOSEND 2024)	https://www.atlantispress.com/proceedings/icosend-24/126008650
4	Roesa Nellyana			The identification of sustainable fishing gear based on the code of conduct for responsible fisheries in West Aceh	https://www.bioconferences.org/articles/bioconf/abs/2025/07/bioconf_icfaes24_03014/bioconf_icfaes24_03014.html
5	Mohd. Din			Responsiveness of Criminal Law Policy towards the Use of Medical Cannabis in the Perspective of Health Services: A Case Study in Indonesia	https://www.atlantispress.com/proceedings/icosend-24/126008630
6	Mohd Din			The Principle of Non-Muslim Submission in Committing Crimes (Islamic Sharia) Together with Muslims in Aceh-Indonesia	https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5212192

Dalam upaya mewujudkan hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum USK telah memiliki karya ilmiah yang dipublikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi sebanyak 8 artikel, Jurnal Nasional Berbahasa Inggris/Bahasa Resmi PBB terindeks DOAJ sebanyak 1 artikel dan Prosiding internasional dalam internasional sebanyak 6 artikel.

Jumlah penelitian dosen yang memperoleh hibah dalam kurun waktu 3 tahun berjumlah 45 judul. Pada tahun 2022 jumlah penelitian dosen yang mendapatkan pendanaan penelitian 15 judul penelitian, pada tahun 2023 sebanyak 13 judul penelitian, dan pada tahun 2024 sebanyak 17 judul.

e. Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam hal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), FH USK telah memiliki 3 desa binaan. Pembentukan desa binaan tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program unggulan berbasis masalah pemberdayaan masyarakat di bidang hukum, pembuatan Qanun, Bakti Sosial, Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, program PkM dibagi kepada 3 aktifitas utama, yaitu:

- 1) Aktifitas pelatihan, pengembangan dan sosialisasi;
- 2) Aktifitas Bakti Sosial; dan
- 3) Aktifitas implementasi hasil-hasil riset.

Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Lembaga Mitra	Tingkat *)			Judul Kegiatan Kerjasama	Manfaat bagi PS yang Diakreditasi	Waktu dan Durasi	Bukti Kerjasama	Tahun Berakhirnya
		Internasional	Nasional	Wilayah / Lokal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemerintah Kota Subulussalam			V	Penelitian Bersama, Pengabdian Kepada Masyarakat	Meningkatkan pengabdian masyarakat dosen, khususnya Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Qanun Kota Subulussalam Tahun 2021.	04-08-2021 s/d 04-08-2024	328/UN11.3 /MoA/2021	2024
2	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam			V	Penelitian Bersama	Meningkatkan pengabdian masyarakat dosen, khususnya Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Qanun Kota Subulussalam Tahun 2021.	04-08-2021 s/d 04-08-2024	333/UN11.3 /MoA/2021	2024

3	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia		V		Penelitian Bersama, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Kurikulum/Program Bersama, Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan	Meningkatkan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen, Pengembangan Kurikulum/Program Bersama, Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan.	02-12-2021 s/d 02-12-2024	288/UN11/H K.02.06/202 1	2024
4	Gampong Bale Meusara, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah			V	Pengabdian Kepada Masyarakat	Meningkatkan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen, Pengembangan Kurikulum/Program Bersama, Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan.	08-07-2022 s/d 08-07-2027	199/UN11/H K.02.06/202 2	2027
5	Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh		V		Pengabdian Kepada Masyarakat, Penyuluhan Hukum	Memperkuat Pengabdian Dosen, Penulisan buku, dan publikasi kegiatan penelitian, workshop, seminar dan kuliah tamu.	2022 Agustus 2022 s/d 5 Agustus 2025	243/UN11/H K.02.06/202 2	2025
6	Fakultas Hukum Universitas Samudra		V		Pengabdian Kepada Masyarakat Secara Kolaboratif	Memperkuat Pengabdian Dosen, Penulisan buku, dan publikasi kegiatan penelitian, workshop, seminar dan kuliah tamu.	2 Februari 2022 s/d 2 Februari 2024	240/UN54.1 /KS/2022	2024
7	Gampong Ceunamprong, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya			V	Pengabdian Kepada Masyarakat	Meningkatkan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen, dan Pengembangan Desa Binaan.	18-01 2022 s/d 18-01- 2027	34/UN11.31 NK/2022	2027

8	Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa		V		Tridarma Perguruan Tinggi, Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Hukum	Pengembangan penelitian dan pengembangan ilmu hukum, program pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.	24 Mei 2022 s/d 24 Mei 2027	143/UN11/H K.02.06/2022	2027
9	Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa		V		Tridarma Perguruan Tinggi, Pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif	Pengembangan penelitian dan pengembangan ilmu hukum, program pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.	30-05-2022 s/d 30-05-2027	142/UN11/H K.02.06/2022	2027
10	Universitas Ubudiyah Indonesia		V		Penelitian Bersama, Tridarma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pengembangan penelitian bersama dan pengembangan ilmu hukum, program pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.	07-06-2022 s/d 07-06-2027	129/UN11/H K.02.06/2022	2027
11	Pengadilan Negeri Banda Aceh		V		Pengabdian Kepada Masyarakat, Penyuluhan Hukum	Pengembangan pengabdian dosen kepada masyarakat, seperti keterlibatan dosen dalam penyuluhan hukum. Memberikan kesempatan bagi Program Studi Sarjana untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), seperti Magang Mahasiswa.	05-08-2022 s/d 05-08-2025	242/UN11/H K.02.06/2022	2025
6	Fakultas Hukum Universitas Samudra		V		Pengabdian Kepada Masyarakat Secara Kolaboratif	Memperkuat Pengabdian Dosen, Penulisan buku, dan publikasi kegiatan penelitian, workshop, seminar dan kuliah tamu.	2 Februari 2022 s/d 2 Februari 2024	240/UN54.1 /KS/2022	2024

7	Gampong Ceunamprong, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya			V	Pengabdian Kepada Masyarakat	Meningkatkan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen, dan Pengembangan Desa Binaan.	18-01-2022 s/d 18-01-2027	34/UN11.31 NK/2022	2027
8	Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa			V	Tridarma Perguruan Tinggi, Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Hukum	Pengembangan penelitian dan pengembangan ilmu hukum, program pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.	24 Mei 2022 s/d 24 Mei 2027	143/UN11/H K.02.06/2022	2027
9	Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa			V	Tridarma Perguruan Tinggi, Pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif	Pengembangan penelitian dan pengembangan ilmu hukum, program pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.	30-05-2022 s/d 30-05-2027	142/UN11/H K.02.06/2022	2027
10	Universitas Ubudiyah Indonesia			V	Penelitian Bersama, Tridarma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pengembangan penelitian bersama dan pengembangan ilmu hukum, program pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.	07-06-2022 s/d 07-06-2027	129/UN11/H K.02.06/2022	2027
11	Pengadilan Negeri Banda Aceh			V	Pengabdian Kepada Masyarakat, Penyuluhan Hukum	Pengembangan pengabdian dosen kepada masyarakat, seperti keterlibatan dosen dalam penyuluhan hukum. Memberikan kesempatan bagi Program Studi Sarjana untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), seperti Magang Mahasiswa.	05-08-2022 s/d 05-08-2025	242/UN11/H K.02.06/2022	2025

12	Kejaksaan Negeri Banda Aceh		V		Penyuluhan Hukum	Pengembangan pengabdian dosen kepada masyarakat, seperti keterlibatan dosen dalam penyuluhan hukum. Memberikan kesempatan bagi Program Studi Sarjana untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), seperti Magang Mahasiswa.	15-08-2022 s/d 15-08-2025	264/UN11/H K.02.08/202 2	2025
13	Pusat Perancangan Undang- Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI		V		Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Dukungan Keahlian Dalam Pelaksaaan Tugas dan Fungsi DPR RI		19 Januari 2022 s/d 19 Januari 2026	46/UN11/HK .02.06/2023	2026
14	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung		V		Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		16 Maret 2023 s/d 16 Maret 2026	155/UN11/H K.02.06/202 3	2026
15	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh		V		Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi		23 Juni 2023 s/d 23 Juni 2028	277/UN11/H K.02.06/202 3	2028

1.1.2. Dinamika Lingkungan Eksternal

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan lulusan yang tanggap dengan perkembangan informasi dan teknologi, yang diimbangi dengan kemampuan berpikir cepat dalam menghadapi perkembangan global.

Alumni FH-USK telah masuk dalam jajaran pengambil kebijakan daerah, nasional dan internasional. Alumni FH- USK tidak hanya diterima dengan baik oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta, melainkan telah menjadi pengambil kebijakan itu sendiri. Kondisi ini tentunya telah menciptakan nilai positif bagi masyarakat terhadap eksistensi

FH-USK, yang biasanya memandang alumni FH-USK memiliki keterbatasan lapangan kerja, namun dewasa ini, menjadi lebih mudah dan luas lapangan pekerjaannya.

Lulusan FH-USK mendapatkan tempat diberbagai bidang baik pemerintahan maupun swasta. Pengguna lulusan yang paling utama adalah kantor-kantor pemerintahan yang berkaitan langsung dengan Sarjana Hukum, seperti kejaksaan, pengadilan, kanwil hukum dan HAM, kantor advokat, Badan Pertanahan Nasional dan kepolisian. Badan pemerintahan lain yang juga banyak menyerap lulusan FH- USK adalah Biro Hukum pada Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota serta BUMN lainnya seperti PT. PLN dan PT. Telkom. Alumni FH- USK juga banyak yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di DPR Aceh maupun DPR Kabupaten/Kota di Aceh, termasuk bekerja sebagai kepala secretariat maupun staf di sekretariat DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh.

Lulusan FH-USK juga banyak mendapatkan kesempatan kerja di bank baik milik negara maupun swasta dan perusahaan-perusahaan lainnya. Bidang kerja yang menjadi peluang bagi lulusan FH-USK pada perusahaan-perusahaan tersebut adalah bidang kontrak dan kerjasama, bidang advokasi dan hukum.

Secara lebih spesifik, lulusan FH-USK juga menjadi tenaga kerja yang dinantikan di setiap Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di provinsi dan setiap kabupaten/kota. Beberapa alumni juga bekerja di kedutaan besar Indonesia diluar negeri maupun di konsulat RI diluar negeri.

Menghadapi era revolusi industri saat ini, FH-USK harus mampu mengimbangi pesatnya perkembangan dengan melakukan analisis yang tepat dari seluruh potensi yang dimiliki sebagai kekuatan yang mendukung, dengan melaksanakan program-program yang relevan berkaitan dengan isu-isu strategis, sehingga mampu melahirkan kontribusi nyata yang mampu menjadi solusi terhadap tantangan terkini dalam masyarakat.

Tatangan-tantangan yang dihadapi saat ini

A. Tantangan dalam pendidikan hukum ditemukan dalam beberapa

bidang diantaranya :

1. Peradilan dan penegakan hukum.
2. Agraria dan sumber daya alam
3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
4. Perundang-undangan.

Untuk menyikapi tantangan tersebut FH- USK harus menyelenggarakan pendidikan hukum berkualitas, mengintegrasikan teknologi modern dan nilai-nilai konstitusional, integritas dan berkarakter.

B. Tantangan dalam kompetensi lulusan berkaitan dengan :

1. Gap kompetensi dan kebutuhan praktis yaitu : tantangan pembangunan hukum terkait kompetensi lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Banyak SDM hukum belum bekerja atau bekerja tidak sesuai bidang dan orientasi pendidikan hukum yang terlalu teoritis.
2. Kurikulum dan metode pembelajaran yaitu :
 - Kurikulum dominan teoritis,
 - Kurang praktek berbasis kasus nyata.
 - Minimnya exposure terhadap tantangan penegakan hukum kontemporer.
 - Pembelajaran konvensional orientasi hafalan peraturan.
 - Kurangnya pengembangan *critical thinking*.
 - Minimnya simulasi kasus dan *clinical legal education*.
 - *Disconnect* dengan realitas lapangan.

Tantangan di atas menjadi prioritas bagi FH untuk melakukan pembenahan di bidang: Reformasi Kurikulum, Kerjasama Strategis. Pengembangan Soft Skills. Kompetensi Digital. Etika dan Integritas. Pembenahan yang dilakukan FH USK mempunyai tujuan strategis yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lulusan yang berkarakter.
2. Menjadi pusat penelitian hukum terbaik di Indonesia.
3. Berkontribusi pada reformasi hukum nasional dan regional.
4. Mencapai standar internasional dalam Pendidikan hukum.

C. Tantangan perkembangan hukum global meliputi :

1. Digital Transformation of Law berkaitan dengan Artificial Intelligence in Legal Practice yaitu :
 - Mengubah praktik hukum global mencapai USD 46.7 miliar pada tahun 2030.
 - AI mengubah cara penelitian hukum, analisis kasus, dan prediksi outcome litigasi.

- Perlu adaptasi dalam Pendidikan hukum.

2. *Cross-border Legal Complexity* yaitu :

- *Legal Technology Integration*
- *International Law Competency.*
- *Comparative Legal Studies*
- *Digital Rights and Cyber Law.*

D. Tantangan Stagnasi *Rule of Law* di Indonesia meliputi :

1. Rule of Law Index berkaitan dengan Krisis kepercayaan public yaitu :

- *Skor rule of law index* Indonesia berada pada angka 0,52- 0,53 sejak 2015-2023.
- Nilai hijau terkait ketertiban dan keamanan dengan nilai 0,71.
- Pembatasan kekuasaan pemerintah dengan nilai 0,66.
- Peradilan pidana dan aspek bebas korupsi mencatat nilai 0,39 dan 0,40.

2. Krisis dalam Penegakan Hukum berkaitan dengan Masalah Budaya dan Profesionalisme yaitu :

- Budaya intervensi penegakan hukum.
- Kurangnya profesionalisme di kalangan penegak hukum.
- Hilangnya kepercayaan publik.

3. Reformasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045 berkaitan dengan kontribusi akademisi dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, transparansi, responsif, dan berkarakter.

4. Krisis Etika dan Integritas berkaitan dengan :

- Prinsip Pendidikan Islam yaitu penerapan fungsi tazkiyah dalam pendidikan (pembersihan jiwa dan pembentukan karakter).
- Ungkapan penting metode, guru, dan ruh/spirit dalam mengajar.

E. Tantangan PTNBH: Suatu Dilema

1. Isu *Sustainability Financial vs. Accessibility* dan *Social Responsibility* yaitu:

- Fokus pada pencarian sumber pendapatan melalui UKT.
- Ketergantungan yang tinggi pada UKT mahasiswa.

- Risiko aktivitas komersial mengabaikan misi pendidikan publik.
2. Model Pendanaan Universitas di Negara Maju
 - Model *Nordic* (Skandinavia) yaitu : *Public service* paradigma dengan pendidikan sebagai hak fundamental dan investasi publik. Pendidikan gratis atau biaya rendah.
 - Model Jerman dan Prancis yaitu : *Free Education* dengan *excellence* (Jerman). *Low- Cost, High- Quality* (Prancis).
 3. Perbandingan Model *Nordic* dengan PTNBH Indonesia
 - Pendidikan sebagai *public good vs. quasi- commodity*.
 - Pendanaan oleh negara vs. ketergantungan pada mahasiswa.
 - Akses universal vs. stratifikasi pendidikan.
 - Kualitas berdasarkan standar negara vs. kompetisi pasar.

Berdasarkan tantangan, pesatnya pembangunan dan perkembangan teknologi mengharuskan FH-USK menyesuaikan kurikulum yang memiliki relevansi dengan pengembangan pendidikan, sumberdaya alam, kebutuhan pembangunan, kebutuhan masyarakat, profesionalisme dan lapangan kerja, melalui penelaahan secara terstruktur berdasarkan masukan-masukan dari pihak eksternal yang memiliki kerjasama langsung dengan FH-USK. Pembinaan yang harus dilakukan FH USK meliputi: Perlu perbaikan kompetensi lulusan, relevansi kurikulum, pemerataan akses pendidikan, serta keseimbangan keberlanjutan keuangan dengan tanggung jawab sosial. Pentingnya karakter dan integritas. Adaptasi dengan Teknologi dan Kebutuhan Pasar Kerja.

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terkait dengan Perumusan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka, FH-USK telah melaksanakan sosialisasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar di Kampus Merdeka, melalui disusunnya panduan kurikulum oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) USK, yang mendukung terlaksananya standar pelaksanaan pendidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan pesan kunci Mendikbud terkait kampus merdeka dan merdeka belajar, yang meliputi; Pilar 1, dosen adalah penggerak, yang memiliki sikap profesional dan inovatif. Pilar 2, perubahan adalah hal yang sulit dan penuh ketidaknyamanan. Pilar 3, konsolidasi kebijakan.

Berdasarkan perkembangan pesat yang terjadi dari sisi kebijakan, tantangan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan persaingan dalam berbagai bidang, maka FH-USK harus cepat tanggap terhadap perubahan tersebut dan berupaya mengimbangi dengan melaksanakan penyesuaian secara bertahap dan terstruktur.

1.1.3. Capaian Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2020-2024

Dinamika lingkungan internal dan eksternal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala merupakan gambaran kondisi umum yang telah dicapai Tahun 2020-2024. Secara detail, capaian kinerja Renstra Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Capaian Kinerja Renstra Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2020-2024

SSV	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU-1.1	Persentase lulusan S1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80.5	81.71	55.47	57.31	50.24
		IKU-1.2	Persentase mahasiswa S1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	40.5	44.61	7.54	9.86	9.68
		IKT-1.1	Rata Rata lulusan tepat waktu, minimal 60% dari jumlah lulusan berdasarkan jenjang	%	4.30	4.45	4.55	66.31	77.29
		IKT-1.2	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	%	6.00	19.54	20.54	29.74	15.52
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU-2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	37.00	52.27	46.07	23.33	55.68

		IKU-2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	78	79.31	56.18	24.44	27.95
		IKU-2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Jumlah	0.30	0.36	0.84	0.94	1.04
		IKT-2.1	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	%	5.7	5.75	7.87	14.44	14.77
		IKT-2.2	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	%	43.18	44.83	42.70	37.78	37.50
		IKT-2.3	Jumlah Jurnal terindeks nasional	Jurnal	2	2	2	2	2
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU-3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1	%	1.00	1.00	1.00	1.00	3.60
		IKU-3.2	Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team- based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	35	35	41.27	33.33	27.66
		IKT-3.1	Jumlah kerjasama institusi di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan insitusi	Jumlah	5	7	11	14	31
		IKT-3.3	Persentase Prodi Terakreditasi Unggul	%	25	25	25	25	25
	Meningkatnya tata kelola	IKK-4.1	Rata-rata predikat Capaian Kinerja Layanan Tridarma	%	84	84.86	86.67	86	64.40
		IKK-4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAT	%	98.90	99.67	89.98	83.90	80.76
		IKK-4.3	Jumlah Fakultas yang Membangun Zona Integritas	Jumlah					1.00
4	Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKT-4.1	Rasio Pendapatan Unit Kerja terhadap Biaya	%	84.00	105.24	83.47	79.10	134.50
		IKT-4.2	Jumlah Pendapatan Unit Kerja	Rp Miliar	13	14.3	15.17	11.30	20.42
		IKT-4.3	Jumlah Pendapatan Unit Kerja dari optimalisasi sumber daya	Rp Miliar	5.9	6.29	0.01	0.030	0.02

1.2. Permasalahan dan Potensi

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan Capaian Kinerja Renstra Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2020-2024 ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi sasaran, hal tersebut disebabkan karena adanya permasalahan. Adapun secara rinci permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. IKU 1.1:
 1. Daya saing lulusan dalam dunia kerja yang belum maksimal;
 2. Akses informasi kerja lulusan belum maksimal;
 3. Rendahnya motivasi lulusan untuk bekerja di luar Aceh.
 4. Orientasi lulusan untuk bekerja di luar instansi pemerintah dan berwirausaha masih rendah.
- b. IKU 1.2: Penyelenggaraan kegiatan MBKM, Pembinaan kegiatan minat dan bakat kemahasiswaan belum optimal.
- c. IKU 2.1: Kesempatan dosen untuk berkegiatan tridarma di perguruan tinggi terbaik masih terbatas; Dosen yang berkarya sebagai praktisi masih belum maksimal, karena terbatasnya sertifikat kompetensi.
- d. IKU 2.2: Motivasi dosen untuk mengikuti kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi masih rendah (selain sertifikasi dosen); Kerjasama dengan mitra belum memadai.
- e. IKU 2.3: Pendanaan untuk kegiatan penelitian yang menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat masih sedikit.
- f. IKU 3.2:
 1. Pemahaman dan pelaksanaan Kurikulum berbasis case method dan based project belum merata;
 2. Masih ditemukan Portofolio mata kuliah berbasis case method dan based project yang belum sesuai dengan standar baku.
- g. IKK 4.2: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAT semakin menurun.
- h. IKT 4.3: Jumlah Pendapatan Unit Kerja dari optimalisasi sumber daya masih rendah.

Permasalahan di atas akan dijadikan sebagai fokus dalam penyusunan Rencana Strategis FH-USK tahun 2025-2029. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

- a. IKU 1.1:
 1. Melakukan revisi kurikulum yang link and match dengan dunia kerja.
 2. Meningkatkan peran alumni untuk memberikan akses informasi dan motivasi kepada calon lulusan.
 3. Meningkatkan kerjasama FH USK dengan DUDI.
- b. IKU 1.2:
 1. Sosialisasi pelaksanaan program MBKM pada mahasiswa.
 2. Memperkuat peran UKM dan organisasi kemahasiswaan sebagai wadah untuk menampung minat dan bakat mahasiswa untuk meraih prestasi.
 3. Melakukan pembinaan minat dan bakat mahasiswa terprogram dan terstruktur.
- c. IKU 2.2:
 1. Memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kompetensi.
 2. Meningkatkan kerjasama dengan DUDI.
- d. IKU 2.3:
 1. Melakukan updating luaran riset dosen yang mendapatkan pendanaan melalui matching fund, riset kolaborasi secara berkala;
 2. Memfasilitasi luaran riset dosen yang berpotensi untuk mendapatkan paten, hilirisasi produk dan pengakuan masyarakat.
 3. Meningkatkan jumlah dana untuk mendukung kegiatan riset yang menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
- e. IKU 3.1:
 1. Meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian
 2. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan teknologi global.
- f. IKU 3.2:
 1. Melakukan pendampingan kepada prodi untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis case methods dan project based secara berkelanjutan.
 2. Melakukan pendampingan dalam penyusunan Portofolio untuk memenuhi kriteria case methods dan project based.

g. IKT 4.3:

1. Megoptimalisasi pemberdayaan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan.
2. Peningkatan capacity building bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

1.2.2 Potensi

FH-USK memiliki potensi yang relatif besar, dan apabila diberdayakan dengan optimal akan menjadi Fakultas yang terkemuka dan berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Potensi yang dimiliki FH-USK apabila dilihat dari aspek internal dan eksternal dapat diuraikan sebagaimana berikut.

a) Pendidikan

Fakultas Hukum saat ini memiliki sumber daya yang kompeten baik tenaga dosen maupun tenaga kependidikan. Jumlah dosen sebanyak 96 orang berstatus PNS dan 2 orang berstatus Non PNS. Jumlah tenaga kependidikan sebanyak 32 orang terdiri dari 15 orang PNS dan 17 orang Non PNS. Potensi sumber daya yang dimiliki Fakultas Hukum ini sangat mendukung adanya perubahan dibidang pendidikan dan juga akan menjamin mahasiswa dalam mengikuti kegiatan merdeka belajar. Untuk mewujudkan perubahan Pendidikan FH-USK berupaya mengoptimalkan pengelolaan pembelajaran melalui penerapan manajemen mutu standar nasional dan internasional serta perluasan akses pendidikan bagi mahasiswa domestik dan mahasiswa asing melalui International Class.

Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulum dan proses pembelajaran. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu lulusan yang unggul dan berdaya saing, maka upaya yang dilakukan oleh FH-USK adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan modul mata kuliah pendidikan dan latihan kemahiran hukum yang relevan dengan dunia kerja;
2. Meningkatkan perluasan tempat praktek kerja lapangan/magang sesuai dengan profesi di berbagai instansi pemerintah maupun swasta;
3. Melakukan revisi dan evaluasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan stakeholders dan Masyarakat;
4. Meningkatkan jumlah dosen yang berkualifikasi doktor;

5. Pengembangan kualifikasi dosen melalui berbagai kegiatan ilmiah (pelatihan, seminar, lokakarya, detasering) sesuai dengan konsentrasi dibidang keahlian;
6. Menambah buku referensi, jurnal ilmiah, jurnal online baik teks berbahasa Indonesia maupun Inggris;
7. Memperbaiki secara reguler kurikulum serta silabus dan RPS agar sesuai dengan kebutuhan pasar atau pengguna;
8. Meningkatkan soft skill mahasiswa dengan caramemberi pelatihan legal drafting, peradilan semu, TOEFL.

Kemampuan daya saing lulusan dalam dunia kerja dan wirausaha menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini tidak terlepas dari proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Kurikulum yang digunakan FH-USK saat ini adalah Kurikulum *Outcome Base Education/OBE* yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Universitas Syiah Kuala Nomor: 2819/UN11/KPT/2024 tentang Buku Kurikulum 2024-2028. Hal-hal penting yang mendasari pengembangan Kurikulum 2024-2028 adalah sebagai berikut:

1. Titik berat pendidikan tetap ditujukan pada bidang keahlian hukum;
2. Ruang lingkup kegiatan kerja sarjana hukum sangat luas, meliputi: pengadilan, kejaksaan, kantor notaris, kantor pengacara, biro/kabag hukum, parlemen dan lain-lain;
3. Perkembangan ilmu hukum dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam bidang komputasi (komputer), teknologi, otonomi daerah, syariat Islam, dan daya saing global;
4. Kompetensi, kemampuan komunikasi, argumentasi, presentasi, dan diskusi merupakan persyaratan seorang sarjana hukum.

Untuk meningkatkan kompetensi dari lulusan, FH-USK memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih program kekhususan yang tersedia, sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Program kekhususan yang dimaksud adalah Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum

Internasional dan kelas internasional. FH-USK juga menawarkan beberapa mata kuliah yang merupakan kekhususan seperti Hukum Otonomi Daerah, Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Bisnis. Kekhususan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dari lulusan FH-USK. FH-USK juga memiliki *international class* sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan. Lulusan yang diharapkan dari program ini adalah lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dibidang hukum internasional, memiliki kemampuan bahasa Inggris serta kemampuan di bidang informasi teknologi.

Untuk meningkatkan capaian IKU Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala telah melakukan berbagai terobosan melalui berbagai inovasi. Pada tahun 2024 inovasi yang dilakukan antara lain:

1. Program MBMK USK UNGGUL

Merupakan salah satu upaya Universitas Syiah Kuala untuk mendukung program merdeka belajar yang telah dicetuskan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Program ini terselenggara sebagai motivasi untuk mewujudkan target yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja Rektor Universitas Syiah Kuala dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dimana pada IKU 1.02 disebutkan bahwa 40% dari mahasiswa aktif harus telah mengikuti program pembelajaran di luar program studi.

Fakultas Hukum USK dalam mendukung program MBKM USK Unggul membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai mitra MBKM, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Mahkamah Syariah Aceh, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kemenkumham, Kantor Firma Hukum, Kantor Notaris, Lembaga Perbankan dan Civil Society Organisation (CSO).



Penempatan Mahasiswa magang MBKM pada beberapa lembaga mitra di atas dirasakan memberikan manfaat tidak hanya bagi mahasiswa tetapi juga bagi mitra MBKM. Bagi mahasiswa kegiatan ini menumbuhkan semangat dan karakter *Lawpreneur*, sedangkan bagi mitra merupakan kesempatan dalam membantu mempersiapkan lulusan Fakultas Hukum USK menjadi lebih siap dalam menghadapi dunia kerja di bidang hukum.



Dalam tahun 2024 terdapat 92 mahasiswa yang mengikuti Program MBKM Magang Profesi Hukum USK Unggul yang tersebar di beberapa lembaga mitra tersebut. Disamping itu, 8 mahasiswa Fakultas Hukum juga mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) *Outbond* di beberapa Perguruan Tinggi Ternama seperti

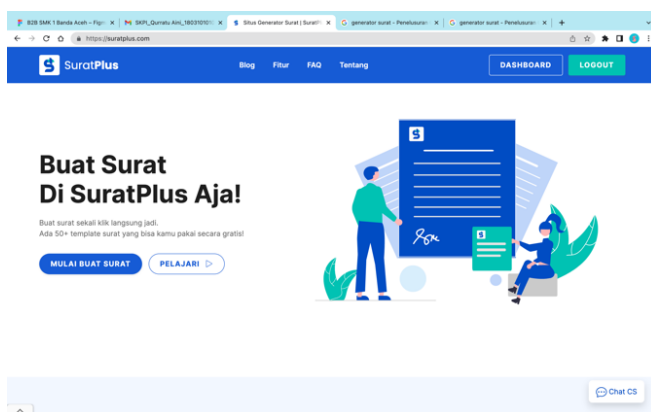
Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas dan lain-lain. Melalui pengembangan kerjasama Fakultas Hukum USK juga menempatkan 7 mahasiswa mengikuti Program Magang Dirjen HPI Kementerian Luar Negeri di Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan 1 mahasiswa mengikuti program Magang Bersertifikat di Bank BPTN Syariah.

2. Program Kewirausahaan Mahasiswa FH USK



Fakultas Hukum USK mendukung Program 1000 wirausaha muda USK sebagai upaya untuk menjawab problematika sosial di negara kita yakni kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks pengangguran, lulusan perguruan tinggi selalu dituding sebagai penyumbang utama angka pengangguran. Diharapkan dengan program ini para mahasiswa FH USK dapat menjadikan peluang


untuk memulai usaha sehingga ketika tamat nantinya justru mampu membuka lapangan pekerjaan.



Hasil tracer pada tahun 2024 terdapat 40 orang lulusan Fakultas Hukum USK yang berwirausaha dalam bidang yang beragam, dari jenis *start-up* seperti *Co-founder* dan *Chief Product Officer* (CPO) di “SuratPlus” (*Start-up Generator Surat Digital*), Skill miner (Bimbel

Soft Skill), hingga jenis usaha makanan dan minuman seperti membuka Kalfaz Coffee (Jl. Dr. Mr.Mohd Hasan, Batoh, Kec.Lueng Bata,Kota Banda Aceh, Aceh 23245).



 skillminer



SKILL MATE TALK VOL.1

Leveraging YSEALI Experience:
Developing Skills for Global Leadership and Local Impact

 27   5



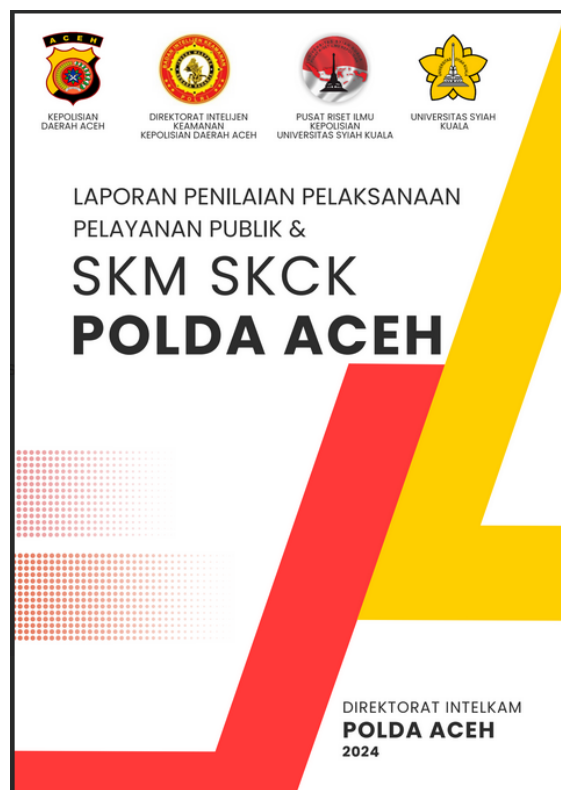
skillminer [Recap Documentation Skill Mate Talk
"Leveraging YSEALI Experience: Developing Skills for Global
Leadership and Local Impact"]

Hai Skill Mate 🍷
Yuk intip recap documentation dari kegiatan skill miner
kemarin!



3. Produk Hukum yang Diadopsi oleh Pemerintah untuk Pembangunan Masyarakat

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum USK membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah terkait dengan pembentukan produk hukum yang digunakan dalam Pembangunan masyarakat salah satunya hasil kajian berupa Laporan Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Publik & SKM SKCK POLDA ACEH yang merupakan kerjasama antara Fakultas Hukum dengan Direktorat Intelkam Polda Aceh di tahun 2024.



PENULIS:

Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.
M. Iqbal, S.H., M.H.
Mirja Fauzul Hamdi, S.H., M.H.
Dedy Yuliansyah, S.H., M.H.
Iqbal Muhammad, S.E., MBA.
Rizky Aulia Fitri, S.H., M.H.
Rozatul Balqis, S.Stat.
Putri Humaira, S.H.
Hasra Diana, S.H.
Arifah Zahra Nasution, S.H.

4. Akreditasi Program Studi di Fakultas Hukum USK

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH-USK) merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Berdiri pada tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 11 Tahun 1961, tertanggal 21 Juni 1961. Dalam perkembangannya sekarang ini Fakultas Hukum USK memiliki 4 (empat) Program Studi, yang terdiri Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S-1), Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH), Program Studi Kenotariatan (MKN), dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum (DIH). Keempat Program Studi tersebut terakreditasi oleh BAN-PT.

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) FH-USK terakreditasi dengan peringkat akreditasi UNGGUL, berdasarkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4679/SK/BAN-PT/Ak-KP/S/VII/2022 Tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Universitas Syiah Kuala, tanggal 26 Juli 2022.



Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) terakreditasi dengan peringkat akreditasi BAIK SEKALI, berdasarkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi SK BAN-PT Nomor 5315/SK/BAN-PT/AK.KP/M/VIII/2022 Tanggal 9 Agustus 2022.

Program Studi Magister Kenotariatan (MKN) terakreditasi dengan peringkat akreditasi BAIK SEKALI, berdasarkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor SK BAN-PT Nomor 796/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 Tanggal 9 April 2019.

Program Studi Doktor Ilmu Hukum (S1) FH-USK terakreditasi dengan peringkat akreditasi BAIK SEKALI, berdasarkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor SK BAN-PT Nomor 4574/SK/BAN-PT/Ak. KP/D/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022.

b) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dosen FH-USK melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melalui berbagai sumber pendanaan baik dari Universitas Syiah Kuala maupun secara mandiri. Disamping itu penelitian dosen juga dilaksanakan atas pembiayaan dari lembaga diluar Universitas Syiah Kuala. Tahun 2024 dosen FH-USK telah mendapatkan pendanaan penelitian sebanyak 44 judul penelitian dari berbagai skim pendanaan penelitian bersumber dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala. Sementara itu penelitian dosen FH-USK dengan pendaan dari Lembaga diluar perguruan tinggi sebanyak 5 judul penelitian.

Dosen FH-USK juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, baik melalui pendaan perguruan tinggi, mandiri, dan melalui pendanaan Lembaga dalam negeri diluar perguruan tinggi. Tahun 2024 dosen FH-USK telah melaksanakan sebanyak 11 kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pembiayaan LPPM-USK. Sementara pengabdian dengan pendaan Lembaga dalam negeri sebanyak 5 kegiatan pengabdian. Disamping itu dosen FH- USK juga melaksanakan pengabdian secara mandiri sebanyak 20 kegiatan.

Dosen FH-USK juga melaksanakan publikasi ilmiah sebagai bentuk luaran dari kegiatan penelitian dosen, baik dalam Jurnal Internasional Bereputasi (52 artikel), Jurnal Internasional (160 artikel), Jurnal Nasional Terakreditasi (85 artikel), Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (50 artikel), dan tulisan di media massa nasional 11 judul.

Selain publikasi ilmiah dosen tetap FH-USK telah menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjumlah 26 dokumen, dokumen hukum naskah akademik dan rancangan kanun Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota sebanyak 27 dokumen, serta buku ber-ISBN atau book chapter sebanyak 47 buah.

Hasil penelitian yang berupa artikel ilmiah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Publikasi karya ilmiah dosen juga diterbitkan melalui jurnal ilmiah yang ada di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, yaitu:

1. Kanun Jurnal Ilmu Hukum (ISSN: 0854-5499)
2. Syiah Kuala Law Journal (ISSN: 2580-9059)
3. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana (ISSN: 2597-6893)
4. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan (ISSN: 2597-6907)
5. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan (ISSN: 2597-6885)
6. Student Journal of International Law (ISSN: 2807-8497)

Kerjasama yang telah dilakukan FH-USK dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai lembaga mitra antara lain dengan: Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan RI, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Syaria'ah Aceh, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi RI.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan Fakultas Hukum dalam bentuk:

1. Forum Ilmiah diantaranya berupa Diskusi Publik, Seminar, Dialog, Bedah Kasus.
2. Layanan Konsultasi Hukum berbasis kerjasama dengan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUM HAM) Wilayah Aceh.
3. Pengiriman Saksi Ahli dari Fakultas Hukum USK kepada organisasi Bantuan Hukum, Instansi/Lembaga Pemerintah dalam rangka memberi keterangan ahli baik untuk keperluan penyelidikan, penyidikan maupun memberikan keterangan ahli di pengadilan termasuk pada sidang sengketa informasi publik.
4. Kampanye Hukum (*Legal Campaign*) pada Media (baik media cetak maupun media *online*) dalam memberikan pendapat hukum di ruang publik berkaitan dengan ragam polemik yang sedang muncul.

FH-USK melaksanakan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dengan berbagai Instansi/Lembaga. Tahun 2024 FH-USK telah melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan (12 kerjasama), dalam bidang penelitian (3 kerjasama), dan kerjasama dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (20 kerjasama).

c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dasar yang dimiliki oleh FH-USK untuk keperluan pembelajaran dan administrasi sudah mencukupi dan kondisinya baik. Hingga kini FH-USK memiliki sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

1. Ruang kuliah, sebanyak 20 ruang
2. Ruang bagian, sebanyak 6 ruang
3. Ruang baca dengan fasilitas pendukung, seperti jaringan internet
4. Ruang klinis hukum, sebanyak 3 ruang (Gedung Moot Court dan FH)
5. Ruang smart classroom
6. Ruang aula, sebanyak 3 ruang
7. Ruang rapat pimpinan
8. Ruang pelayanan administrasi sebanyak 4 subbagian dan kabag
9. Ruang mushalla.
10. Lounge FH
11. Gedung PPs FH-USK

Seluruh prasarana dilengkapi dengan sarana yang memadai dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk mendukung proses pembelajaran.

FH-USK juga menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik untuk memperkaya bahan ajar yang akan diberikan kepada mahasiswa, sehingga bahan ajar tersebut selalu mengikuti perkembangan terbaru/up to date. Fasilitas internet juga digunakan oleh tenaga pendidik untuk memberikan informasi kepada tenaga pendidik dan mahasiswa melalui surat elektronik (email). Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasannya juga dapat menggunakan fasilitas internet yang diakses melalui ruang baca FH- USK.



Keterangan: Ruang Baca



Keterangan: Aula tempat dilaksanakannya Workshop, kuliah tamu maupun kegiatan akademik lainnya



Keterangan: Ruang Smart Classroom.

Ruang *Video Conference* dimanfaatkan untuk penyelenggaraan sistem informasi manajemen perkara, penyelenggaraan persidangan mahkamah konstitusi jarak jauh, penyiaran persidangan mahkamah konstitusi secara langsung, penyelenggaraan pusat informasi hukum online, penyelenggaraan lomba debat konstitusi, sosialisasi hukum acara mahkamah konstitusi, penyelenggaraan peradilan semu (*mootcourt*), dan kuliah jarak jauh.



Keterangan: Ruang Rapat Pimpinan



Keterangan: Laboratorium Klinis Hukum sebagai sarana pendukung bagi mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.



Keterangan: Lounge



Keterangan: Ruang belajar Program Kelas Internasional



Keterangan: Ruang belajar Program Reguler



Keterangan: Gedung PPs FH

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Kursi Kuliah	906
2	LCD	20
3	Layar LCD	20
4	AC	105
5	Meja Dosen di ruang Kuliah	20
6	Glassboard	22
7	Jurnal Arena Hukum	9
8	Buku MK Wajib	3139
9	Buku MK wajib nasional	320
10	Wajib Program Studi	2819
11	Buku MK pilihan	4069
12	Buku MK antar bagian/pilihan semua bagian	61
13	Buku referensi umum	522
14	Buku bidang ilmu lain/di luar bidang studi yg ditekuni	198
15	Proseding nasional	13
16	Proseding internasional	10
17	Jurnal tersedia	91

d) **Kerjasama dengan mitra**

Potensi Fakultas Hukum melakukan kerjasama dengan mitra pada tingkat internasional, nasional, dan tingkat wilayah/lokal. Berikut ini dipaparkan bentuk Kerjasama yang telah dilakukan Fakultas Hukum.

a. **Melakukan Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut:

1. Investo International Partners
2. International Center for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS);
3. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID);

4. The Association of Korean Law Schools Republic of Korea.

b. Melakukan Kerjasama Nasional

Kerjasama nasional yang dilakukan oleh Fakultas Hukum pada tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir, diantaranya dengan:

1. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka;
2. Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Studi Magister Universitas Dharmawangsa;
3. Lawfirm Taufik Hidayat, S.H & Partners
4. Fakultas Hukum Universitas Samudra.
5. Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia.
6. Kantor Notaris/PPAT Saifullah, S.H
7. Universitas Malikulsaleh.
8. Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keadilan Sekretariat Jenderal DPR RI.
9. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
10. Kantor Notaris/PPAT Taufik, S.H.
11. Law office Junnahbar & Partners.
12. Kantor Hukum Yofnedi & Rekan.
13. Kementrian Hukum Luar Negeri RI
14. Perhimpunan Advokat Indonesia
15. Kemitraan Partnership
16. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.
17. Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
18. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI.

c. Melakukan Kerjasama Wilayah/Lokal

Kerjasama tingkat wilayah/lokal yang dilakukan oleh Fakultas Hukum pada tingkat lokal dalam 3 tahun terakhir, diantaranya dengan:

1. Kanwil Kementerian Hukum Aceh;
2. Kejaksaan Negeri Banda Aceh
3. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
4. Yayasan Hutan Alam dan lingkungan Aceh (HAKA)
5. Pengadilan Negeri Banda Aceh
6. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
7. Universitas Ubudiyah Indonesia
8. Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur
9. Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
10. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
11. Dinas Perhubungan Aceh
12. Pengadilan Negeri Blangpidie
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
14. Komisi Inependen Pemilihan Aceh

15. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh
16. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Aceh
17. Polresta Banda Aceh
18. Komisi Informasi Aceh
19. Mahkamah Syari'ah Aceh
20. Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Aceh

Kerjasama yang dilakukan pada tingkat internasional, nasional, dan wilayah/lokal mencakup 3 bidang tridarma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kerjasama yang dilakukan di atas dapat mendukung dan menjamin keberlangsungan peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi di fakultas hukum dan mitra.

e) Perjanjian kinerja antara Dekan Fakultas Hukum dengan Rektor Universitas Syiah Kuala

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38/2022, tentang Penetapan USK berstatus PTN-BH pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3/M/2010 tentang Indiator Kinerja Utama yang selanjutnya dirubah dengan Keputusan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 210/M/2023, ditindaklanjuti dengan pembuatan kontrak kinerja Dekan Fakultas Hukum dengan Rektor Universtias Syiah Kuala tahun 2025 dengan butir indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

SSV	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU-1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%
		IKU-1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%

		IKT-1.1	Rata Rata lulusan tepat waktu, minimal 60% dari jumlah lulusan berdasarkan jenjang	%
		IKT-1.2	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	%
		IKT-1.3	Rerata persentase pertumbuhan mahasiswa baru (S1, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	%
		IKT-1.4	Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana, D4, D3) dibagi jumlah dosen tetap saat TS (non PJJ)	Rasio
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU-2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%
		IKU-2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Jmlh
		IKT-2.1	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	%
		IKT-2.2	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	%
		IKT-2.3	Jumlah Jurnal terindeks nasional	Jurnal
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU-3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	%
		IKU-3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%

		IKT-3.1	Jumlah kerjasama institusi di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan insitusi	Jmlh
		IKT-3.3	Persentase Prodi Terakreditasi Unggul	%
4	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK-4.1	Penguatan Akuntabilitas pada Zona Integritas	%
		IKK-4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-T	%
		IKK-4.3	Jumlah Fakultas yang membangun Zona Integritas	Jmlh
		IKT-4.1	Rasio Pendapatan Universitas terhadap Biaya Operasional	%
		IKT-4.2	Jumlah Pendapatan Universitas (Rp Milyar)	Rp. Miliar
		IKT-4.3	Jumlah Pendapatan Universitas yang Berasal dari Pengelolaan Aset (Rp Milyar)	Rp. Miliar

f. Analisis Masalah dan Potensi

Berdasarkan masalah dan potensi Fakultas Hukum yang dipaparkan di atas maka diperlukan upaya pemikiran untuk mengembangkan Rencana Strategis yang berdaya saing baik dibandingkan dengan masa Rencana Strategis sebelumnya. Masalah dan potensi yang dihadapi Fakultas Hukum dituangkan dalam Analisis SWOT sebagai tersebut di bawah ini.

Internal

Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Predikat Akreditasi Unggul 2. Memiliki lulusan yang berdaya saing. 3. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala dan guru besar semakin meningkat. 4. Tersedianya dana untuk peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik 5. Terealisasinya program penelitian pengabdian kepada masyarakat. 6. Terealisasinya Kerjasama dengan mitra. 7. Tersedianya kurikulum berbasis <i>case method dan project based</i>. 8. Memiliki pendapatan dan sumber daya untuk manajemen tatakelola yang mandiri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya saing lulusan dalam dunia kerja yang belum maksimal; Akses informasi kerja lulusan belum maksimal; Rendahnya motivasi lulusan untuk bekerja di luar Aceh.Orientasi lulusan untuk bekerja di luar instansi pemerintah dan berwirausaha masih rendah. 2. Penyelenggaraan kegiatan MBKM, Pembinaan kegiatan minat dan bakat kemahasiswaan belum optimal. 3. Kesempatan dosen untuk berkegiatan tridarma di perguruan tinggi terbaik masih terbatas; Dosen yang berkarya sebagai praktisi masih belum maksimal, karena terbatasnya sertifikat kompetensi. 4. Motivasi dosen untuk mengikuti kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi masih rendah (selain sertifikasi dosen); 5. Kerjasama dengan mitra belum memadai. 6. Pendanaan untuk kegiatan penelitian yang menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat masih sedikit. 7. Pemahaman dan pelaksanaan Kurikulum berbasis <i>case method dan project based</i> belum merata; Masih ditemukan Portofolio mata kuliah berbasis <i>case method dan project based</i> yang belum sesuai dengan standar baku. 8. Belum memiliki akreditasi internasional 9. Sumber Daya yang dimiliki belum diberdayakan secara optimal.

Eksternal

Opportunity (Peluang)	Threatness (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Program Merdeka Belajar 2. Implementasi Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran Kesiapterapan Teknologi. 3. Adanya badan Pendidikan dan pelatihan yang memberikan sertifikat kompetensi bagi dosen. 4. Terjalannya kerjasama dengan instansi/lembaga/perusahaan untuk kegiatan akademik (magang), riset, pengembangan wirausaha mahasiswa dan bisnis universitas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 5. Penetapan Ranking oleh Kemdikbud 6. Penetapan Akreditasi oleh BAN - PT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya lembaga di Aceh yang memberikan predikat layak uji bagi produk penelitian untuk dinilai sebagai produk inovasi. 2. Semakin berkurangnya peluang kerja bagi lulusan untuk mendapatkan Pekerjaan. 3. Pertumbuhan ekonomi yang rendah berdampak kepada kemampuan perusahaan untuk memberikan peluang atau kepedulian kepada PTN berpartisipasi memberdayakan kerjasama akademik, riset 4. Ketatnya persaingan antar PT dalam Perankingan 5. Standar akreditasi semakin berat

Dari analisis masalah dan potensi yang dimiliki Fakultas Hukum dalam pencapaian Rencana Strategis 2020-2024, maka untuk Rencana Strategis 2025-2029 Fakultas Hukum akan mengupayakan pengembangan potensinya dalam pencapaian kinerja secara maksimal agar mampu meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.2.3 Analisis Masalah dan Potensi

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2020 sampai dengan 2024, terdapat permasalahan yang menjadi pemicu tidak tercapainya target. Permasalahan tersebut dapat dikaji dari eksternal organisasi dan internal organisasi

Permasalahan eksternal organisasi

- Kecilnya investor yang menanamkan modal di Aceh sehingga berpengaruh terhadap jumlah perusahaan besar yang dapat menampung tenaga kerja yang banyak.
- Mitra atau lembaga belum memahami Kebijakan Kementerian terkait merdeka belajar dengan komponennya untuk memberikan akses kegiatan mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

- Pembinaan dari Badan Pembina Olahraga dan Seni di tingkat nasional dan daerah terhadap organisasi kemahasiswaan masih kurang maksimal.
- Badan pelaksana sertifikat kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi dosen masih terbatas.
- Terbatasnya jumlah DUDI yang ada di wilayah Aceh yang dapat memberikan kesempatan dosen untuk berkarya atau memberikan kesempatan praktisinya untuk mengajar.
- Terbatasnya mitra untuk mengadakan penelitian kolaboratif, baik dari DUDI, LSM, Organisasi Kemasyarakatan dan Instansi Pemerintah.

Permasalahan internal organisasi

- Daya saing lulusan dalam dunia kerja Akses informasi kerja lulusan belum maksimal, Rendahnya motivasi lulusan untuk bekerja di luar Aceh. Orientasi lulusan untuk bekerja di luar instansi pemerintah dan berwirausaha masih rendah.
- Pembinaan kegiatan minat dan bakat kemahasiswaan belum optimal.
- Motivasi dosen untuk mengikuti kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi masih rendah (selain sertifikasi dosen),
- Kerjasama FH USK dengan DUDI belum memadai
- Pendataan luaran riset dosen yang mendapatkan pendanaan melalui matching fund, riset kolaborasi belum optimal, Pendanaan Universitas Syiah Kuala untuk kegiatan riset yang menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat masih sedikit.
- Kerjasama FH USK dengan Institusi/Organisasi Multilareal dan Lembaga Kebudayaan berskala Nasional/Bereputasi belum memadai.

Meskipun permasalahan-permasalahan tersebut diprediksi dapat memperlambat upaya pencapaian target, hal ini dapat diatasi dengan adanya potensi-potensi baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi.

Peluang eksternal organisasi

1. Status PTN BH memberikan kemudahan bagi FH USK untuk membuka program studi baru.
2. Adanya program MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian
3. Adanya kejuaraan atau kompetisi bagi mahasiswa, baik di tingkat internasional, nasional dan provinsi.
4. Terdapat informasi kerja bagi alumni dari lembaga pemerintah, dunia usaha atau perusahaan, studi lanjut dari perguruan tinggi dan peluang untuk berwirausaha.
5. Adanya mitra dari dunia usaha dan industri serta lembaga pemerintah yang memanfaatkan aset SDM untuk menjadi praktisi atau tenaga ahli.
6. Adanya badan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan sertifikasi kompetensi bagi dosen.
7. Penetapan ranking universitas yang berdaya saing internasional menuntut USK agar menjadi lebih inovatif dan terkemuka dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Adanya mitra FH USK dan alumni yang mendukung kegiatan tri dharma pendidikan di FH USK baik dari dalam dan luar negeri;
9. Akreditasi internasional pada program studi sehingga memberikan peluang untuk membuat prodi unggulan berstandar internasional (international class);
10. Status USK menjadi PTN BH memberikan kemandirian dalam tata kelola, manajemen, dan keuangan FH USK.

Tantangan eksternal organisasi

1. Semakin banyak perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai kompetitor;
2. Kuota yang disediakan terbatas, melalui hibah kompetisi, sehingga perguruan tinggi lain menjadi kompetitor.
3. Persaingan untuk mendapatkan prestasi dengan kompetitor pada kejuaraan sangat ketat, baik di tingkat internasional, nasional maupun provinsi.
4. Lowongan yang disediakan sangat terbatas, dengan tingkat ketetapan persaingan antar calon tenaga kerja yang relatif tinggi.
5. Dunia usaha dan industri yang ada di Aceh masih relatif sedikit untuk memberikan peluang dosen menjadi praktisi atau tenaga ahli.

6. Jenis sertifikasi yang diselenggarakan banyak yang tidak relevan dengan bidang yang sesuai tugas dan fungsi dosen.
7. Terbatasnya lembaga di Aceh yang memberikan predikat layak uji bagi produk penelitian untuk dinilai sebagai proptipe industri dan produk inovasi;
8. Indikator kinerja utama PTN yang perlu dicapai USK dalam mengembangkan kerja sama akademik dengan perusahaan multi-nasional, teknologi global, rumah sakit, Lembaga riset dan PT QS200
9. Persaingan antar perguruan tinggi nasional terhadap ketersediaan kelas internasional dan profesi menuntut USK untuk mengembangkan program studi profesi dan metode pembelajaran;
10. Persaingan dari kompetitor bagi perguruan tinggi dalam hal layanan pendidikan, maupun dari kalangan dunia usaha yang memberikan layanan non akademik.
11. Persaingan yang semakin ketat bagi perguruan tinggi lain yang sudah lebih eksis dalam mempersiapkan aspek-aspek yang terkait green matric.

1.2.4 Analisis Peluang dan Tantangan

Peluang eksternal organisasi

1. Adanya kejuaraan atau kompetisi bagi mahasiswa, baik di tingkat internasional, nasional dan provinsi.
2. Terdapat informasi kerja bagi alumni dari lembaga pemerintah, dunia usaha atau perusahaan, studi lanjut dari perguruan tinggi dan peluang untuk berwirausaha.
3. Adanya mitra dari dunia usaha dan industri serta lembaga pemerintah yang memanfaatkan aset SDM untuk menjadi praktisi atau tenaga ahli.
4. Adanya badan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan sertifikasi kompetensi bagi dosen.
5. Status USK menjadi PTN BH memberikan kemandirian dalam tata kelola, manajemen, dan keuangan bagi FH USK

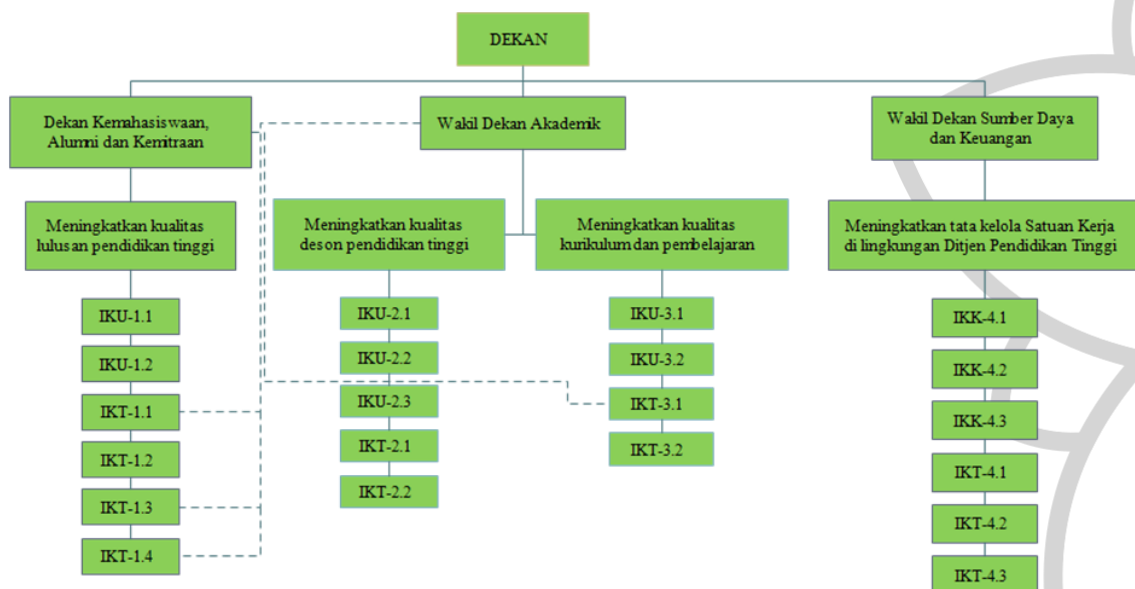
Tantangan eksternal organisasi

1. Semakin banyak perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai kompetitor;
2. Kuota yang disediakan terbatas, melalui hibah kompetisi, sehingga perguruan tinggi lain menjadi kompetitor.

3. Persaingan untuk mendapatkan prestasi dengan kompetitor pada kejuaraan sangat ketat, baik di tingkat internasional, nasional maupun provinsi.
4. Lowongan yang disediakan sangat terbatas, dengan tingkat ketetapan persaingan antar calon tenaga kerja yang relatif tinggi.
5. Dunia usaha dan industri yang ada di Aceh masih relatif sedikit untuk memberikan peluang dosen menjadi praktisi atau tenaga ahli.
6. Jenis sertifikasi yang diselenggarakan banyak yang tidak relevan dengan bidang yang sesuai tugas dan fungsi dosen.
7. Terbatasnya lembaga di Aceh yang memberikan predikat layak uji bagi produk penelitian untuk dinilai sebagai proptipe industri dan produk inovasi;

1.2.5 Penjabaran Kinerja dan Cascading Fakultas Hukum USK

Penjabaran kinerja dan cascading per jajaran kinerja dapat dilihat pada Gambar Cascading Perjanjian Kinerja, beserta indikator-indikatornya.



SSV	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja	Cascading
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU-1.1	Persentase lulusan S1 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	WD 3
		IKU-1.2	Persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	
		IKT-1.1	Rata Rata lulusan tepat waktu, minimal 60% dari jumlah lulusan berdasarkan jenjang	WD 1
		IKT-1.2	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	WD 3
		IKT-1.3	Rerata persentase pertumbuhan mahasiswa baru (S1) dalam 5 tahun terakhir	WD 1
		IKT-1.4	Jumlah mahasiswa aktif dibagi jumlah dosen tetap saat TS (non PJJ)	
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU-2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	WD 1
		IKU-2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	
		IKU-2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	
		IKT-2.1	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	

		IKT-2.2	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	
		IKT-2.3	Jumlah Jurnal terindeks nasional	
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU-3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	WD 1
		IKU-3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	
		IKT-3.1	Jumlah kerjasama institusi di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan insitusi	WD3
		IKT-3.3	Persentase Prodi Terakreditasi Unggul	WD 1
4	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK-4.1	Penguatan Akuntabilitas pada Zona Integritas	WD 2
		IKK-4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-T	
		IKK-4.3	Jumlah Fakultas yang membangun Zona Integritas	
		IKT-4.1	Rasio Pendapatan Universitas terhadap Biaya Operasional	
		IKT-4.2	Jumlah Pendapatan Universitas (Rp Milyar)	
		IKT-4.3	Jumlah Pendapatan Universitas yang Berasal dari Pengelolaan Aset (Rp Milyar)	

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala membutuhkan pedoman sebagai arah kebijakan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS). Penyusunan VMTS sangat dipengaruhi oleh semangat untuk menjadikan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebagai lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing.

2.1. Visi dan Misi FH-USK

Visi FH-USK adalah :

” Menjadi Fakultas Law-preneur yang inovatif, mandiri, dan unggul di tingkat nasional dan internasional”

Misi FH-USK adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter law-preneur yang kompetitif;
2. Menyelenggarakan penelitian hukum yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian hukum kepada masyarakat yang bermanfaat dan berkelanjutan;
4. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama kelembagaan di tingkat nasional dan internasional; dan
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang Tridharma Perguruan Tinggi melalui penerapan prinsip transparansi, efektif, efisien, dan partisipatif serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel.

2.2. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan tugas dan fungsi FH USK, yang telah ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja FH USK yang disebutkan bahwa, FH-USK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Untuk melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan pendidikan, pengajaran dan pengembangan pendidikan tinggi;
2. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
5. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Dari tugas dan fungsi, telah dirumuskan tujuan FH-USK yaitu:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter law-preneur yang kompetitif;
2. Menghasilkan penelitian hukum yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan;
3. Menghasilkan pengabdian hukum kepada masyarakat yang bermanfaat dan berkelanjutan;
4. Menghasilkan kerja sama lembaga di tingkat nasional dan internasional yang saling menguntungkan dan berkelanjutan; dan
5. Mewujudkan manajemen mutu terpadu di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola yang akuntabel.

Adapun indikator tujuan FH-USK sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan		Target
1	Pelaksanaan layanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK;	1.1	Jumlah Mahasiswa yang diterima	744
		1.2	Jumlah mahasiswa yang terlayani kegiatan perkuliahan	2381
		1.3	Jumlah Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan	372
		1.4	Tersedianya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi lulusan	289
		1.5	Terwujudnya pembukaan Program studi yang baru	-
		1.6	Jumlah Program studi Profesi	-
		1.7	Jumlah pusat tempat Uji Kompetensi yang dikembangkan	-
		1.8	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	13
		1.9	Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti program pembinaan karakter	610
		1.10	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program UP3AI	610
		1.11	Jumlah Dokumen peraturan tentang etika sivitas akademika (warga kampus)	2
		1.12	Jumlah Dosen yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pekerti	8
		1.13	Jumlah Dosen yang mengikuti pendidikan dan pelatihan AA	8
2	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan;	2.1	Jumlah proposal penelitian yang disubmit	25
		2.2	Jumlah artikel yang dipublis pada Jurnal terakreditasi	25
		2.3	Jumlah jurnal internal terakreditasi	2
		2.4	Jumlah Jurnal Nasional DOAJ	2
		2.5	Jumlah Jurnal Terinstgrasi BKSPNTB	-
		2.6	Jumlah JIM	4

		2.7	Jumlah Desa binaan dalam program pengabdian	3
		2.8	Jumlah proposal pengabdian pada masyarakat yang disubmit	
		2.9	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pengabdian masyarakat	90
		2.10	Jumlah artikel dipresentasikan di Seminar internasional	5
		2.11	Jumlah produk Riset Unggulan Perguruan Tinggi	-
		2.12	Jumlah produk teknologi tepat Guna (TTG), Rekayasa sosial, Rekayasa sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, industri, maupun antar Universitas.	-
		2.13	Jumlah Model/Prototype/ Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial	5
		2.14	Jumlah judul Riset Iptek	-
		2.15	Jumlah riset Terapan	-
3	Peningkatan peran untuk menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	3.1	Jumlah prodi yang mengembangkan kurikulum bersama	4
		3.2	Jumlah mahasiswa peserta magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh	45
		3.3	Jumlah prodi yang melaksanakan Kelas Internasional dan kerjasama	1
		3.4	Jumlah mahasiswa dari luar negeri yang direkrut	1
		3.5	Meningkatnya Jumlah mahasiswa peserta Program pertukaran (Student exchange)	5
4	Pelaksanaan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui tata kelola yang akuntabel.	4.1	Persentase Tindak lanjut pemeriksaan BPK	-
		4.2	Opini Penilaian BPK	-
		4.3	Jumlah Unit Bisnis	-

		4.4	Jumlah produk modernisasi layanan	-
		4.5	Terwujudnya Akreditasi Institusi	4
		4.6	Persentase Program Studi yang menerapkan SPMI	4
		4.7	Meningkatnya Unit Kerja yang berserikat	1
		4.8	Meningkatnya Peringkat <i>Green Matric</i>	1

2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran FH-USK yang telah dirumuskan yaitu:

1. Meningkatnya lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter law-preneur yang kompetitif;
2. Meningkatnya luaran penelitian hukum yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya pengabdian hukum kepada masyarakat yang bermanfaat dan berkelanjutan;
4. Meningkatnya kerja sama lembaga di tingkat nasional dan internasional yang saling menguntungkan dan berkelanjutan; dan
5. Meningkatnya kualitas manajemen mutu terpadu di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola yang akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan sasaran dan indikator kinerjanya pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

SSV	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU-1.1	Persentase lulusan S1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		IKU-1.2	Persentase mahasiswa S1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		IKT-1.1	Rata Rata lulusan tepat waktu, minimal 60% dari jumlah lulusan berdasarkan jenjang	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		IKT-1.2	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		IKT-1.3	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	%	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
		IKT-1.4	Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana, D4, D3) dibagi jumlah dosen tetap saat TS (non PJJ)	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU-2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
		IKU-2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

		IKU-2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		IKT-2.1	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
		IKT-2.2	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	%	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		IKT-2.3	Jumlah Jurnal terindeks nasional	Jurnal	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU-3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1	%	1	1	1	1	1
		IKU-3.2	Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		IKU-3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%					
		IKT-3.1	Jumlah kerjasama institusi di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan insitusi	Jumlah	15	15	15	15	15
		IKT-3.2	Persentase Prodi Terakreditasi Unggul	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

4	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK-4.1	Nilai Penguatan Akuntabilitas (SAKIP)	%	80,00	81,00	82,00	82,00	83,00
		IKK-4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-T	%	84,00	85,00	87,00	88,00	90,00
		IKK-4.3	Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	Jumlah	1	1	1	1	1
		IKT-4.1	Rasio Pendapatan Unit Kerja terhadap Biaya Operasional	%	80,00	81,00	83,00	85,00	86,00
		IKT-4.2	Jumlah Pendapatan Unit Kerja	Rp Miliar	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00
		IKT-4.3	Jumlah Pendapatan Unit Kerja yang berasal dari pengelolaan Aset	Rp Miliar	0,020	0,022	0,024	0,025	0,026

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan rencana strategis FH USK tahun 2020-2024 telah dilaksanakan secara utuh dan konsisten sampai dengan akhir tahun 2024 yang meliputi 4 sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran; dan
4. Meningkatnya Tata Kelola di lingkungan Fakultas Hukum USK.

Untuk menindaklanjuti sasaran strategis dari Rencana Strategis FH-USK 2020-2024 di atas, maka Sasaran Strategis dari Rencana Strategis FH-USK tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter law-preneur yang kompetitif;
2. Meningkatnya luaran penelitian hukum yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya pengabdian hukum kepada masyarakat yang bermanfaat dan berkelanjutan;
4. Meningkatnya kerja sama lembaga di tingkat nasional dan internasional yang saling menguntungkan dan berkelanjutan; dan
5. Meningkatnya kualitas manajemen mutu terpadu di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola yang akuntabel.

Untuk kelanjutan perencanaan strategis FH-USK tahun 2025-2029 maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kualitas mutu lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional;
2. Meningkatkan kualitas mutu dan kompetensi dosen sesuai bidangnya;

3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas pengabdian dan penelitian inovatif serta pengembangan hasil pengabdian dan penelitian;
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi baik di tingkat daerah, nasional dan internasional,
5. Meningkatkan tata kelola fakultas yang berkualitas, transparan dan akuntabel;

Untuk mengimplementasikan arah dan kebijakan FH - USK maka disusun pilar-pilar strategis, yaitu:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu dan berdaya saing nasional dan internasional,
2. Peningkatan program kewirausahaan (*law-preneurship*) bagi mahasiswa
3. Pengimplementasian program *general education* dan penguatan karakter
4. Pelaksanaan magang
5. Peningkatan kualitas dosen yang kompeten, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan ketersediaan informasi yang baik;
6. Pengembangan sistem pembelajaran *e-learning* berbasis *cloud*;
7. Persiapan pembentukan program studi berakreditasi internasional, peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pertukaran mahasiswa, *double degree*, *guest international lecturer*,
8. Peningkatan mutu program studi melalui capaian akreditasi nasional unggul
9. Penciptaan produk dan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdaya guna dan berhasil guna bagi Masyarakat
10. Penguatan program pengabdian kepada masyarakat di tingkat daerah dan nasional
11. Peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi dalam pengembangan pendidikan dan penelitian;
12. Perwujudan program *Green Campus*;
13. Penguatan kearifan lokal;
14. Peningkatan kualitas pengelolaan fakultas yang transparan dan akuntabel

Berdasarkan pilar-pilar yang telah ditetapkan tersebut maka dilakukan beberapa strategi pengembangan yang dilandasi oleh visi, misi, tujuan, dan sasaran pada Renstra 2025- 2029 yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;

Strategi Pengembangan 2025-2029:

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran:
 - a) Meningkatkan kualitas mahasiswa yang berwirausaha;
 - b) Meningkatkan kompetensi mahasiswa;
 - c) Meningkatkan mahasiswa berprestasi akademik; dan
 - d) Meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja.
 - e) Meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan studi
 - f) Penguatan karakter mahasiswa;
 - g) Pengimplementasian program *general education* dan penguatan karakter
 - h) Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan kearifan lokal;
2. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
 - a) Jumlah publikasi internasional;
 - b) Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan;
 - c) Jumlah prototipe penelitian dan pengembangan (*Research and Development/R&D*);
 - d) Jumlah prototipe industri;
 - e) Jumlah sitasi karya ilmiah;
 - f) Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional;
 - g) Jumlah jurnal bereputasi terindeks global;
 - h) Jumlah produk inovasi;
 - i) Jumlah desa binaan;
 - j) Jumlah kegiatan pengabdian;
 - k) Persentase dosen berkualifikasi S3;
 - l) Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala;
 - m) Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar;
 - n) Persentase tenaga pendidik bersertifikasi;
3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran:
 - a) Ranking perguruan tinggi nasional;
 - b) Persentase prodi terakreditasi Unggul;
 - c) FH- USK berakreditasi unggul menuju akreditasi internasional;
 - d) Memperkuat dan meningkatkan mutu daya saing internasional (QS, *Webometric*, *Greenmetric*, AUN- A);
 - e) Pengembangan sistem pembelajaran *e-learning* berbasis *cloud*;

- f) Penguatan sistem informasi yang terintegrasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung manajemen dan pembelajaran;
 - g) Program Internasionalisasi yang meliputi pembentukan program studi berakreditasi internasional, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pertukaran mahasiswa, *double degree*, *guest international lecturer*, *world class professor*, *summer class*, *summer course*;
- b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olah raga dan seni;

Strategi Pengembangan:

- a) Meningkatkan jumlah kegiatan peningkatan kerjasama perusahaan/ industri dan instansi;
 - b) Meningkatkan jumlah kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi;
 - c) Meningkatkan jumlah kegiatan yang membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus;
 - d) Memperkuat institusi menjadi hasil pusat unggulan mendukung program nasional/ Daerah;
 - e) Meningkatkan kerjasama dengan mitra pemerintah dan lembaga lain;
 - f) Promosi kerjasama internasional
 - g) Jumlah kegiatan rintisan kerjasama akademik;
 - h) Jumlah kegiatan monitoring terhadap implementasi kerjasama akademik;
 - i) Jumlah kegiatan promosi peningkatan jumlah mahasiswa asing;
 - j) Meningkatkan jumlah kegiatan kerjasama riset unggulan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional atau internasional;
 - k) Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat di tingkat daerah dan nasional;
 - l) Menghasilkan produk hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdaya guna dan berhasil guna bagi Masyarakat;
 - m) Mendorong terlaksananya magang;
 - n) Penguatan program pengabdian kepada masyarakat di tingkat daerah dan nasional;
- c. Mewujudkan fakultas yang mandiri
- a) Melaksanakan restrukturisasi organisasi sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki fakultas;
 - b) Optimalisasi aset sebagai sumber pendapatan fakultas;
 - c) Implementasi kerjasama kelembagaan, riset, dan pengabdian dalam rangka peningkatan pendapatan fakultas;
 - d) Mengidentifikasi potensi dan aset yang dimiliki fakultas untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dan *income generating*.
 - e) Mengembangkan *Green campus*

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku institusi dan organ penyelenggara dalam rangka mencapai tujuan perguruan tinggi. Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran manajemen perguruan tinggi dalam mencapai sasaran strategis. Dasar acuan penyusunan regulasi pada perguruan tinggi adalah produk perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah: Undang-Undang, Peraturan pemerintah (Peraturan Presiden, Peraturan Kementerian), Keputusan pemerintah (Keputusan Presiden, Keputusan Kementerian), Surat Edaran yang relevan dengan Perguruan Tinggi.

Beberapa produk perundangan yang relevan dengan perguruan tinggi, diantaranya, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan mengacu produk perundangan ini, maka kemudian proses penyusunan kerangka regulasi dilakukan dengan tahapan: evaluasi, penelitian dan rekomendasi.

Tahap evaluasi merupakan proses mengenal dan melakukan pengkajian terhadap regulasi yang sudah tersedia dan digunakan. Produk regulasi yang telah dimiliki dan dilaksanakan yang dijadikan landasan hukum untuk peraturan dan keputusan lainnya mengacu pada: (1) Statuta Universitas Syiah Kuala yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016, (2) Organisasi dan Tata Laksana Universitas Syiah Kuala berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016, telah menjadi pedoman di dalam pelaksanaan peraturan di Universitas Syiah Kuala. Statuta merupakan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Di dalam implementasinya, Rektor Universitas Syiah Kuala menggunakan acuan ini dalam menerbitkan Peraturan dan Keputusan Rektor yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasional administrasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Untuk menyelaraskan dengan perkembangan kebijakan yang senantiasa berubah sesuai kondisi politik, sosial, budaya dan aspek lainnya, maka produk regulasi perlu dievaluasi. Pencapaian yang dilaksanakan berdasarkan rencana operasional tiap tahun perlu dievaluasi, disosialisasi dan didokumentasikan. Kajian untuk menyesuaikan produk regulasi dapat dilakukan melalui penelitian terhadap perubahan kebijakan pemerintah/kementerian dan perundangan lainnya yang berlaku secara nasional dan daerah. Untuk mendapatkan masukan dapat dilakukan dengan menggunakan survei kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) secara berkala. Pendekatan lain dapat dilaksanakan melalui kegiatan diskusi kelompok atau *Focus Discussion Group* (FGD). Penelitian juga dapat menggunakan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga nasional/internasional dan lainnya sebagai indikator capaian yang telah dilakukan setiap tahunnya. Produk regulasi yang digunakan FH- USK mengacu pada:

- a. Statuta Universitas Syiah Kuala
- b. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
- c. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala
- d. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala
- e. Surat Edaran Rektor Universitas Syiah Kuala
- f. Peraturan Senat Universitas Syiah Kuala
- g. Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum

Produk regulasi yang dihasilkan tidak semata-mata untuk keperluan organisasi dan akademik, namun harus mencakup kegiatan yang mengarah pada tercapainya visi dan misi fakultas. Standar nasional yang ditetapkan kementerian dan standar yang ditetapkan oleh Universitas Syiah Kuala yang melampaui standar nasional, perlu menjadi mutu dalam mewujudkan pelaksanaan tridharma di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Standar penilaian oleh kementerian, Lembaga pemeringkatan nasional/internasional, badan akreditasi nasional/internasional dan lainnya dapat dijadikan acuan dalam menetapkan rencana operasional.

3.3. Kerangka Kelembagaan

3.3.1. Struktur Organisasi

FH-USK dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berstatus PTN-BH berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Berdasarkan peraturan tersebut struktur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi FH-USK diuraikan sebagai berikut.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Fakultas Hukum didukung dengan keberadaan sumber daya manusia (SDM). Hingga saat ini, SDM FH USK, baik dari sisi kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan memperlihatkan perkembangan kearah yang lebih baik.



Organisasi FH terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. SAF;
- d. Bagian Administrasi Umum;
- e. Departemen;
- f. SJMF;
- g. TPMA;
- h. SP4; dan
- i. pusat/unit penunjang lain yang diperlukan.

a. Dekan

Dekan sebagai pimpinan tertinggi dan pengambil keputusan terakhir. Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan yang terdiri dari :

- a. Wakil Dekan Akademik;
- b. Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan; dan
- c. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.

b. Wakil Dekan

- 1) Wakil Dekan Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang akademik.
- 2) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan FH.
- 3) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan FH

c. Senat Akademik Fakultas

Senat Akademik Fakultas Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di FH. Anggota senat fakultas terdiri dari unsur para pimpinan, para Guru Besar, para Ketua Bagian, dan perwakilan dosen yang mewakili masing- masing bagian. SAF diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

d. Kepala Bagian Administrasi Umum

Kepala Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, kemitraan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, dan pelaporan.

Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan. Di bawahnya ada 4 (empat) Kepala Sub Bagian, yaitu:

- a. Subbagian Pembelajaran dan Akademik;
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Sumber Daya; dan
- d. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.

Subbagian dipimpin oleh Kepala. Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Wakil Dekan terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum. Tugas masing-masing subbagian sebagai berikut :

- 1) Subbagian Pembelajaran dan Akademik mempunyai tugas melakukan urusan pembelajaran, akademik, dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data FH.
- 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan keuangan.
- 3) Subbagian Umum dan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, aset, dan sumber daya manusia.
- 4) Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

e. Departemen

Departemen mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, serta mengelola sumber daya pendukungnya. Departemen dipimpin oleh Kepala Departemen yang bertanggung jawab kepada Dekan. Kepala Departemen dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen. Kepala Departemen dapat merangkap sebagai salah satu Koordinator Program Studi pada Departemen tersebut. Kepala dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.

Departemen FH terdiri atas:

- a. Kepala dan Sekretaris;
- b. Program Studi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen; dan
- d. Kelompok Bidang Keahlian.

Program merupakan bagian dari Departemen yang mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu. Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen. Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Program Studi Fakultas Hukum terdiri atas:

- a. Sarjana Ilmu Hukum;
- b. Magister Ilmu Hukum;
- c. Magister Kenotariatan; dan
- d. Doktor Ilmu Hukum.

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum memiliki kelompok bagian berdasarkan kedisiplinan ilmu pendidikan di FH. Bagian dipimpin oleh Ketua Bagian yang bertanggung jawab kepada Koordinator Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Kelompok bagian terdiri atas:

- a. Bagian Hukum Keperdataan;
- b. Bagian Hukum Pidana;
- c. Bagian Hukum Tata Negara;
- d. Bagian Hukum Administrasi;
- e. Bagian Hukum Internasional; dan
- f. Bagian Kelas Internasional.

f. SJMF

SJMF mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik di FH. SJMF bertanggung jawab kepada Dekan. Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas. Tim tersebut bertugas:

- a. Penjabaran manual mutu akademik universitas ke dalam manual mutu akademik fakultas.
- b. Pengaturan audit mutu akademik internal Fakultas.
- c. Melaporkan audit mutu akademik kepada pimpinan fakultas.

g. TPMA

TPMA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku. TPMA dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan Program Studi. TPMA bertanggung jawab kepada SJMF.

h. Satuan Penyusunan Program Perencanaan Dan Penganggaran

SP4 merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan dan hasil yang diinginkan dari program yang telah direncanakan sebelumnya pada tingkat Fakultas. SP4 bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan. Tim Penyusunan Rencana Teknis Fakultas ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas. Tim tersebut bertugas:

- a. Mengakomodasi, menganalisis dan menyusun program perencanaan kegiatan, program, dan anggaran pada semua unit kerja dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala berdasarkan skala prioritas melalui mekanisme perencanaan *bottom-up*.
- b. Menyelenggarakan rapat kerja Fakultas Hukum.
- c. Membuat Dokumen Rencana Teknis Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

3.2. Sumber Daya Manusia

FH-USK sekarang ini memiliki 96 (sembilan puluh enam) orang tenaga pendidik yang berstatus PNS dan berstatus Non PNS sebanyak 2 orang. Keseluruhan dosen FH-USK tersebut telah menempuh jenjang Pendidikan Magister dan Doktor secara lengkap dapat disajikan sebagai berikut.

Berdasarkan jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen PNS FH-USK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah Dosen	Persentase
1	S2	54	60,42
2	S3	42	39,58
Jumlah		96	100

Jumlah Dosen Non PNS FH-USK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah Dosen	Persentase
1	S2	2	100
	Jumlah	2	100

Jumlah Dosen PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional

Jumlah Dosen PNS FH-USK Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Tenaga Pengajar	10	10,42
2	Asisten Ahli	8	8,33
3	Lektor	33	35,38
4	Lektor Kepala	29	30,20
5	Guru Besar	16	16,67
	Jumlah	96	100

Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Pendidikan.

Jumlah tenaga kependidikan sampai dengan akhir September 2025 berjumlah 15 orang dari PNS dan 17 orang dari Non PNS dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Tenaga Kependidikan PNS FH-USK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	D3	2	13,33
2	S1	12	80
3	S2	1	6,67
	Jumlah	15	100

Jumlah Tenaga Kependidikan Non PNS FH-USK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	D3	7	1,18
2	S1	10	58,82
Jumlah		17	100

3.3. Reformasi Birokrasi

Untuk melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan FH-USK, maka perlu disusun program kegiatan untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan, dengan menciptakan program dan kegiatan untuk mendorong terciptanya budaya kerja positif dan kondusif untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- Penguatan implementasi nilai-nilai FH USK yang berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik;
- Memperbanyak dan memperkuat peranan dan kemampuan agen perubahan yang mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan
- Penguatan semangat kerja kelompok (team work) berorientasi pada layanan dan target kinerja yang terintegrasi sistem online.

Agenda prioritas yang menjadi kegiatan program Manajemen Perubahan FH USK, meliputi:

- Peningkatan jumlah dan peran agen perubahan FH USK
- Implementasi budaya kerja sesuai dengan kebutuhan birokrasi ideal;
- Sosialisasi dan internalisasi kegiatan Program Manajemen Perubahan; dan
- Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja berbasis online.

2. Penguatan Kelembagaan

Dengan menciptakan program dan kegiatan yang mampu mendorong terciptanya budaya atau perilaku yang lebih kondusif dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Rencana aksi program Penguatan Kelembagaan akan memprioritaskan kegiatan pada rencana aksi berikut:

- a) Perubahan dan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja;
- b) Mengoptimalkan kinerja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur-unsur organisasi;
- c) Pengusulan rincian tugas unit kerja ke Rektor.

3. Peningkatan Sumber Daya

Perubahan pada aspek sumber daya dilakukan dengan menciptakan program dan kegiatan untuk mendorong terciptanya budaya kerja positif dan kondusif untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Pola Mutasi Internal
Pemenuhan indikator Pola Mutasi Internal melalui:
 - a. Menghimpun data pegawai
 - b. Menyusun data pemetaan kompetensi pegawai
 - c. Menyusun Surat Keputusan tentang Kebijakan Mutasi Internal;
 - d. Menyusun Laporan Hasil Monev terhadap kegiatan mutasi (rolling bidang/bagian).
2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
 - a. Menyusun kebijakan/SOP pengembangan kompetensi dan Training Need Analysis (TNA);
 - b. Menyusun TNA;
 - c. Menyusun kebijakan/SOP pengembangan kompetensi;
 - d. Monitoring dan evaluasi atas hasil pengembangan kompetensi;
 - e. Menyusun Laporan Hasil Monev terhadap hasil pengembangan kompetensi.
3. Penetapan Kinerja Individu
 - a. Penetapan Kinerja Individu
 - b. Penyusun SKP
4. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku dilaksanakan melalui:
 - a. Menyusun laporan disiplin pegawai bulanan;
 - b. Sosialisasi terkait peraturan pegawai/kode etik perilaku pegawai;

Agenda prioritas yang menjadi kegiatan program Manajemen Perubahan Fakultas meliputi:

- a) Implementasi budaya kerja sesuai dengan kebutuhan birokrasi ideal;
- b) Melaksanakan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja berbasis online;
- c) Penegakan aturan disiplin/kode etik dengan penerapan fingerprint secara online secara efektif.

4. Penguatan Tata Laksana

Dengan menciptakan program dan kegiatan yang mampu mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta perubahan mental aparatur. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan melaksanakan rencana aksi:
 1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu pada proses bisnis Unit Kerja Fakultas Hukum;
 2. Penyesuaian SOP makro dan mikro dengan dengan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Penerapan SOP;
 4. Melakukan evaluasi penerapan SOP;
 5. Melakukan pemutakhiran SOP atas kegiatan utama di lingkungan Unit Kerja
- b) Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan melaksanakan rencana aksi:
 1. Memanfaatkan layanan/*e-government* yang telah ada;
 2. Menggunakan sistem *e-government* baru untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan fakultas, antara lain:
 - Sistem manajemen persuratan dalam mendukung penerapan sistem kearsipan yang handal yaitu *Office Automation (OA)*;
 - Sistem analisis jabatan yang terintegrasi dengan penilaian kinerja pegawai; dan
 - Sistem informasi manajemen kepegawaian.
- c) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan melaksanakan rencana aksi:
 1. Peningkatan fungsi Unit Layanan Terpadu; dan
 2. Publikasi setiap jenis layanan, melalui x-banner, TV wall, dan lainnya.

5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menciptakan program dan kegiatan yang mampu mendorong birokrasi untuk berkinerja lebih baik serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan sumber daya yang dipergunakan.

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- a) Melaksanakan penyusunan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan kontrak Kinerja antara Dekan dengan Rektor USK, kemudian antara prodi dengan Dekan. Kegiatan ini melibatkan pimpinan Fakultas dan Tim SP4.
- b) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kegiatan ini melibatkan pimpinan Fakultas dan Tim SP4.
- c) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 5 tahun. Kegiatan ini dilakukan oleh panitia penyusunan renstra.
- d) Membuat Laporan Kerja Tahunan. Kegiatan ini dilakukan oleh panitia penyusunan laporan kerja tahunan.

6. Penguatan Pengawasan

Dengan menciptakan program dan kegiatan yang menghadirkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Program aksi yang dapat dilakukan untuk penguatan pengawasan diantaranya adalah:

- a. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi, dengan menjalankan beberapa kegiatan seperti:
 1. Membuat kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi; dan
 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi di lingkungan USK dengan membuat web pelaporan gratifikasi.
- b. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan melakukan beberapa kegiatan:
 1. Pelaksanaan pedoman operasional kerja di bidang keuangan, kepegawaian, akademik dan aset;
 2. Melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga kependidikan secara berjenjang;
 3. Melakukan monitoring kehadiran melalui fingerprint.

- c. Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan melakukan beberapa kegiatan:
 1. Mengimplementasikan Kebijakan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat;
 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- d. Pelaksanaan *Whistle Blowing System (WBS)*, dengan melakukan beberapa kegiatan:
 1. Menetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapan SK Rektor;
 2. Membuat pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan instansi dalam wilayah FH USK;
 3. Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan WBS;
 4. Menyusun program pengendalian pelaksanaan WBS; dan
 5. Menyusun program monitoring dan evaluasi atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS.
- e. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan, dengan melakukan beberapa kegiatan:
 1. Membentuk dan menetapkan pengelola penanganan benturan kepentingan;
 2. Menyusun pedoman pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
 3. Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
 4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
- f. Pembangunan Zona integritas dengan menetapkan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan menciptakan program dan kegiatan yang mendorong perubahan profesionalisme para penyedia layanan serta peningkatan kualitas pelayanan, yang terdiri atas:

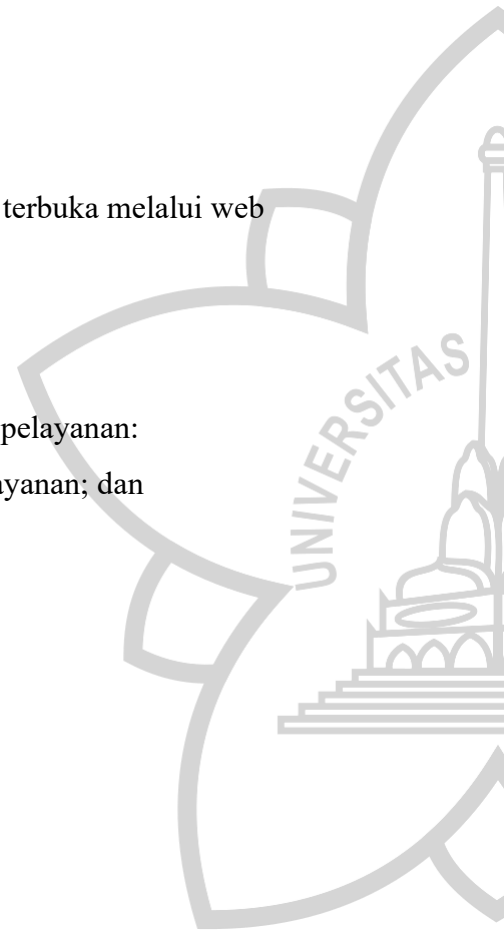
- a. Layanan peserta didik;
- b. Layanan substansi pendidikan;
- c. Layanan tenaga pendidik dan kependidikan.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Hukum, meliputi:

- a. Menciptakan Budaya Pelayanan Prima:
 1. Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam rangka penerapan budaya pelayanan prima;
 2. Melakukan evaluasi tentang kemudahan akses layanan melalui berbagai media;
 3. Menyusun sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan; dan
 4. Melakukan pengembangan dan inovasi layanan.

- b. Menerima umpan balik terhadap kepuasan layanan:
 1. Melakukan survei kepuasan publik;
 2. Mendesiminasikan hasil survei kepuasan publik secara terbuka melalui web FH USK;
 3. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan publik.

- c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan:
 1. Menerapkan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan; dan
 2. Melakukan perbaikan secara terus menerus.



BAB IV
KERANGKA PENDANAAN DAN TARGET KINERJA

4.1. Rincian Pendapatan 2024

FAKULTAS HUKUM			
Pendapatan	=	20.423.802.234	
Biaya Operasional , terdiri dari:			
Pagu DAMAS	=	4.633.685.600	
Pagu BPPTNBH	=	381.520.000	
Kebutuhan Gaji	=	7.214.061.200	
Kebutuhan Remun	=	3.610.196.921	
		15.839.463.721	
Faktor Pengurang :			
Belanja Modal	=	654.000.000	
		20.423.802.234	
15.839.463.721	-	654.000.000	x 100%
20.423.802.234			
15.185.463.721	x	100%	134,50

Non Pendidikan	15.000.000
Semester Antara	151.350.000
Leges	7.277.000
Layanan Pendidikan	20.418.531.234
Penerimaan	20.592.158.234
Pengembalian	168.356.000
Pendapatan Total	20.423.802.234
IKT.4.1	134,50
IKT.4.2	20,42
IKT.4.3	0,022
SERAPAN	90,02

Lampiran Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Kode. SS	Sasaran Strategis	Kode. IKU	Indikator Kinerja Utama	Kode. Komponen	Komponen Kinerja	Kode. Sub. Komponen	Detail Subkomponen	Detail Kegiatan	Biaya Tahun 2025	Biaya Tahun 2026	Biaya Tahun 2027	Biaya Tahun 2028	Biaya Tahun 2029
1	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.1	[IKU.1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/DI yang berhasil memiliki pekerjaan melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta.	KU.1.1.A	Memiliki pekerjaan	KU.1.1.A.04	Pembinaan Alumni	Workshop Public Speaking dan Penulisan Curriculum Vitae (S1, MIH dan MKn)	13.500.000	11.250.000	13.500.000	14.500.000	15.500.000
2	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.1	[IKU.1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/DI yang berhasil memiliki pekerjaan melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta.	KU.1.1.B	Melanjutkan studi	KU.1.1.B.01	Informasi Study Lanjut Lulusan dalam dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.	Workshop metodologi penelitian bagi MIH/MKN dan DIH	13.500.000	11.250.000	13.500.000	14.500.000	15.500.000
3	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.1	[IKU.1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/DI yang berhasil memiliki pekerjaan melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta.	KU.1.1.C	Menjadi wiraswasta	KU.1.1.C.03	Dukungan Potensi dan Minat Kewirausahaan Mahasiswa	Dukungan Potensi dan Minat Kewirausahaan Mahasiswa	37.200.000	36.450.000	37.200.000	38.500.000	39.200.000
4	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.1	[IKU.1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/DI yang berhasil memiliki pekerjaan melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta.	KT.1.1.D	Jumlah (%) lulusan tepat waktu	KT.1.1.D.01	Layanan tugas akhir mahasiswa	Kegiatan Layanan tugas akhir mahasiswa dan Pelaksanaan Wisuda Lokal	212.100.000	211.350.000	212.100.000	214.500.000	215.300.000

5	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.2	[IKU.1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	KU.1.2.A	Menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi	KU.1.2.A.01	Pedoman Kurikulum Mata kuliah Kampus Merdeka	FGD Evaluasi Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Sarjana Hukum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	3.750.000	-	-	-	-
6	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.2	[IKU.1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	KU.1.2.B	Meraih prestasi	KU.1.2.B.02	Keikutsertaan Kompetisi Mahasiswa Tingkat Nasional	Kompetisi Mahasiswa Tingkat Nasional	72.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
7	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.2	[IKU.1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	KU.1.2.B	Meraih prestasi	KU.1.2.B.05	Penbinaan organisasi kemahasiswaan (ormawa)	Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan	81.000.000	81.000.000	82.500.000	83.000.000	84.500.000
8	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.2	[IKU.1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	KU.1.2.B	Meraih prestasi	KT.1.2.B.07	Kompensasi dan Toleransi PBM bagi Mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan internasional (Seminar, workshop, pelatihan dsb)	Kompetisi Mahasiswa Tingkat Internasional	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

9	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.2	[IKU.1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	KT.1.2.C	Peningkatan Kualitas Input Mahasiswa Baru	KT.1.2.C.01	Melaksanakan Sosialisasi/Pro mosi peningkatan kualitas calon mahasiswa.	Sosialisasi Prodi kepada Calon lulusan SMA dan Stakeholder	53.520.000	53.520.000	53.520.000	53.520.000	53.520.000
10	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.2	[IKU.1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	KT.1.2.C	Peningkatan Kualitas Input Mahasiswa Baru	KT.1.2.C.04	Pengenalan Program Pendidikan (Materikulasi)	Kegiatan Pakarmaru (S1) & Mengajar Matrikulasi DIH, MKN dan MIH	63.800.000	63.800.000	63.800.000	63.800.000	63.800.000
11	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.2	[IKU.1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	KT.1.2.D	Penguatan Kualitas Proses Layanan Pembelajaran	KT.1.2.D.04	Proses Belajar Mengajar	Honor Mengajar Dosen	153.600.000	153.600.000	155.200.000	157.500.000	160.000.000
12	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.2	[IKU.1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	KT.1.2.D	Penguatan Kualitas Proses Layanan Pembelajaran	KT.1.2.D.06	Pengadaan Buku Perpustakaan dan e-Jurnal	Pengadaan Buku Ruang Baca FH USK	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
13	SKL	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU.1.2	[IKU.1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	KT.1.2.D	Penguatan Kualitas Proses Layanan Pembelajaran	KT.1.2.D.08	Penyelenggaraan Kuliah tamu dan Visiting Professor	Kegiatan Kuliah Tamu dan Visiting Professor dari Luar Negeri	67.400.000	64.400.000	67.400.000	68.200.000	70.100.000

14	SKD	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU.2.1	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	KU.2.1.C	Dosen Pendamping Mahasiswa Berprestasi	KU.2.1.C.01	Penugasan Dosen pembimbing mahasiswa Berprestasi tingkat nasional yang dapat diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia	Pendampingan Kompetisi Mahasiswa	87.920.000	87.920.000	89.880.000	91.500.000	93.100.000
15	SKD	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU.2.2	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	KU.2.2.A	Dosen Sertifikasi Profesi/Kompetensi	KU.2.2.A.01	Diklat dosen untuk memiliki sertifikasi Kompetensi yang terdaftar pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)/(LSP).	Pelatihan Dosen untuk memiliki sertifikasi kompetensi	119.800.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
16	SKD	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU.2.2	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	KT.2.2.D	Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar / Lektor Kepala	KT.2.2.D.02	seminar/pelatihan /works shop Calon Guru Besar	Keikutsertaan dalam Konferensi Nasional dan Workshop penulisan Jurnal Ilmiah Bereputasi/Karya Ilmiah	74.425.000	33.355.000	50.205.000	54.555.000	60.500.000

17	SKD	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU.2.3	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	KU.2.3.A	Peningkatan Kuantitas Karya Ilmiah	KU.2.3.A.03	publikasi nasional dalam jurnal nasional	Jurnal Kanun dan SKLJ	15.300.000	15.300.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
18	SKD	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU.2.3	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	KU.2.3.A	Peningkatan Kuantitas Karya Ilmiah	KU.2.3.A.07	Peningkatan Minat Penerbitan Jurnal	Pelatihan penulisan jurnal Internasional bereputasi	4.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
19	SKD	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU.2.3	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	KU.2.3.A	Peningkatan Kuantitas Karya Ilmiah	KU.2.3.A.08	Pembiayaan Pengelolaan Jurnal	Insentif Reviewer luar Institusi Jurnal KANUN & SKLJ	21.980.000	22.980.000	22.980.000	22.980.000	22.980.000
20	SKD	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU.2.3	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	KU.2.3.A	Peningkatan Kuantitas Karya Ilmiah	KU.2.3.A.09	Peningkatan Kapasitas Jurnal untuk terindeks Global	Peningkatan Kapasitas Jurnal Kanun dan SKLJ untuk terindeks Global	-	72.000.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000

21	SKD	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU.2.3	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	KU.2.3.B	Peningkatan Kuantitas Karya Terapan	KT.2.3.B.04	Jumlah produk pengabdian masyarakat yang dihasilkan dan dimanfaatkan masyarakat	Pengabdian Masyarakat Berdampak	86.000.000	129.450.000	132.300.000	135.250.000	137.500.000
22	SKD	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU.2.3	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	KT.2.3.W	Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peningkatan Karya Dosen	KT.2.3.W.11	Pengadaan HAKI/Paten/IS SN/ISBN/Merk Dagang	Jurusan pendaftaran HKI	1.980.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	SKK	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU.3.1	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	KU.3.1.A	Jumlah Prodi Pelaksana Kerjasama	KU.3.1.A.04	Kerjasama Prodi Pengembangan Kurikulum	Pertemuan dengan mitra Pendampingan magang mahasiswa Hukum prodi S1	2.500.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
24	SKK	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU.3.1	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	KT.3.1.X	Pemenuhan Kebutuhan Bahan dan Barang Habis Pakai Peningkatan Kemitraan dan jejaring Tridarma	KT.3.1.X.02	Konsumsi dan Jamuan Tamu	Pelaksanaan Kerjasama	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000

25	SKK	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU.3.2	[IKU.3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	KU.3.2.A	Mata kuliah Case Method	KU.3.2.A.01	Penerapan metode pembelajaran Pemecahan kasus (case method)	Workshop Evaluasi Kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE)	21.500.000	-	-	-	-
26	SKK	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU.3.2	[IKU.3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	KU.3.2.B	Mata Kuliah Best Team Project	KU.3.2.B.03	Penerapan metode pembelajaran team based project	Workshop penulisan buku panduan bagi Prodi S1 dan MIH/DIH	9.000.000	-	-	-	-
27	SKK	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU.3.3	[IKU.3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	KU.3.3.A	Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional	KU.3.3.A.01	Akreditasi Unggul Prodi	Akreditasi/Assesment Program Studi	40.450.000	10.900.000	40.450.000	40.450.000	40.450.000
28	SKK	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU.3.3	[IKU.3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	KU.3.3.A	Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional	KU.3.3.A.02	Akreditasi Internasional Prodi	Persiapan dan Pelaksanaan Penyusunan Akreditasi Internasional	34.780.000	31.780.000	40.500.000	-	-

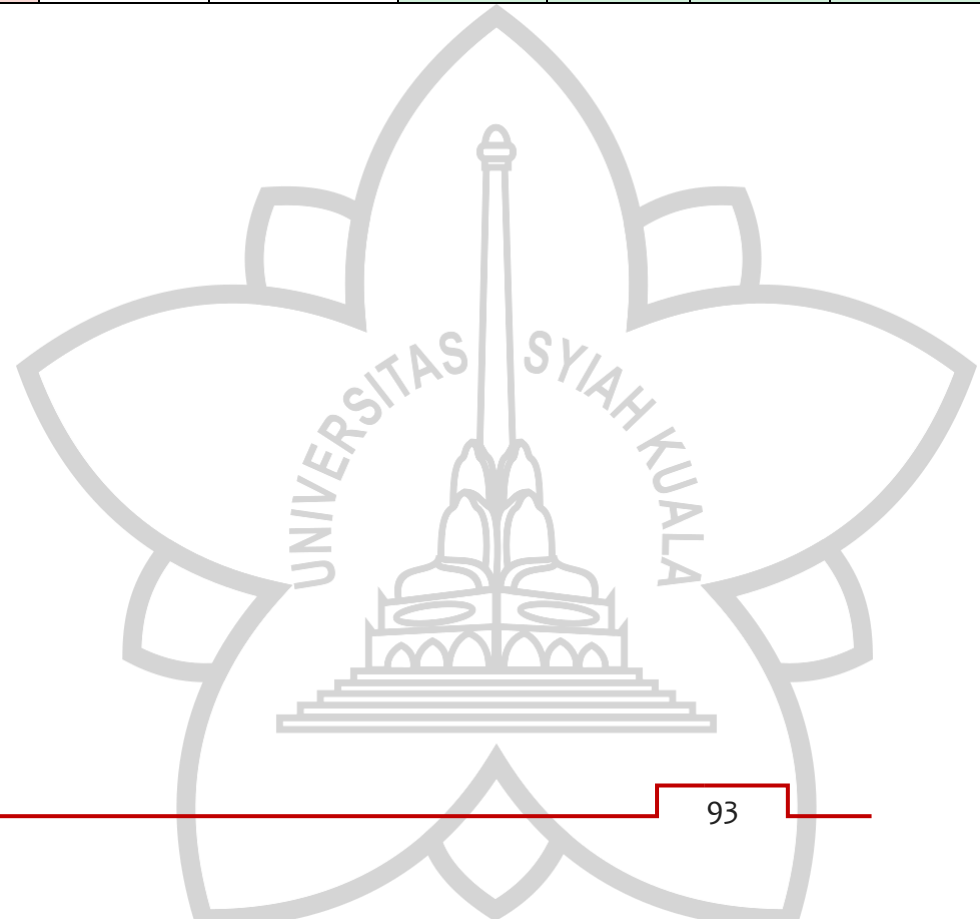
29	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKM.4.1	[IKK.4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	KM.4.1.A	Perencanaan Kinerja	KM.4.1.A.01	Penyediaan Dokumen Perencana Kinerja	Raker Fakultas & USK	61.360.000	54.000.000	62.220.000	63.464.000	64.733.000
30	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.E	Gaji dan Tunjangan Dosen Non PNS	KT.4.2.E.01	Beban Gaji Pokok Dosen Non PNS	Gaji Dosen Non PNS	45.600.000	87.400.000	87.400.000	87.400.000	87.400.000
31	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.F	Gaji dan Tunjangan Tendik Non PNS	KT.4.2.F.01	Beban Gaji Tendik Non PNS	Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS	884.640.000	1.261.620.000	1.261.620.000	1.261.620.000	1.261.620.000
32	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.F	Gaji dan Tunjangan Tendik Non PNS	KT.4.2.F.05	Beban Lembur	Honor Kegiatan diluar jam Dinas	14.560.000	12.320.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000
33	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.F	Gaji dan Tunjangan Tendik Non PNS	KT.4.2.F.06	Beban Honorarium Tambahan	Honor Tugas Tambahan	58.500.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000

34	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK.4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.I	Honorarium Tugas Tambahan	KT.4.2.I.06	Honorarium Perbendaharaan	Honorarium Pengelola Keuangan	86.184.000	96.720.000	96.720.000	96.720.000	96.720.000
35	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK.4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.W	Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peningkatan NKA/IKPA	KT.4.2.W.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	286.440.000	269.000.000	320.000.000	327.000.000	330.000.000
36	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK.4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.Y	Pemenuhan Kebutuhan Langganan Daya dan Jasa Rutin Peningkatan NKA/IKPA	KT.4.2.Y.02	Langganan Daya Air	Langganan Air PDAM	12.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	17.000.000
37	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK.4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.Y	Pemenuhan Kebutuhan Langganan Daya dan Jasa Rutin Peningkatan NKA/IKPA	KT.4.2.Y.03	Bahan Bakar/Pelumas	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas	288.000.000	288.000.000	290.000.000	292.500.000	295.300.000
38	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK.4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.Y	Pemenuhan Kebutuhan Langganan Daya dan Jasa Rutin Peningkatan NKA/IKPA	KT.4.2.Y.04	Langganan Daya Internet, Media Informasi dan Komunikasi	Langganan Internet, Telepon, Zoom Meeting dan Google Drive	41.000.000	41.000.000	45.500.000	45.500.000	49.500.000

39	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK.4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.Y	Pemenuhan Kebutuhan Langganan Daya dan Jasa Rutin Peningkatan NKA/IKPA	KT.4.2.Y.05	Langganan Asuransi/Pajak Sarpras	Pajak kendaraan dinas	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
40	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK.4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.Y	Pemenuhan Kebutuhan Langganan Daya dan Jasa Rutin Peningkatan NKA/IKPA	KT.4.2.Y.08	Perawatan Rutin Peralatan	Pemeliharaan & Perbaikan Peralatan Inventaris	225.000.000	180.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000
41	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK.4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.Y	Pemenuhan Kebutuhan Langganan Daya dan Jasa Rutin Peningkatan NKA/IKPA	KT.4.1.Y.09	Jasa Keamanan dan Kebersihan	Retribusi Sampah	10.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
42	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK.4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.2.X	Pemenuhan Kebutuhan Bahan dan Barang Habis Pakai Peningkatan NKA/IKPA	KT.4.2.X.04	Keperluan Perkantoran	Belanja Alat Tulis Kantor	97.680.000	101.226.000	101.226.000	101.226.000	101.226.000
43	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKM.4.3	Persentase Fakultas Yang Membangun Zona Integritas	KM.4.3.B	Penataan Tatalaksana	KM.4.3.B.05	Stakeholder's Relationship Tata Kelola dan Kemandirian	Pengembangan Tata Kelola dan Kemandirian	418.500.000	331.750.000	430.500.000	445.000.000	460.500.000

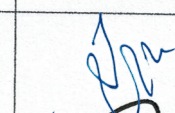
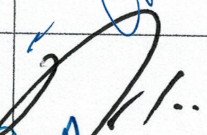
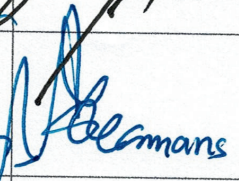
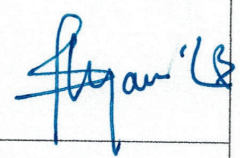


44	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKM.4.3	Persentase Fakultas Yang Membangun Zona Integritas	KM.4.3.B	Penataan Tatalaksana	KM.4.3.B.06	Kapabilitas Internal Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kapasitas Tendik	99.000.000	78.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000
45	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKM.4.3	Persentase Fakultas Yang Membangun Zona Integritas	KM.4.3.C	Penataan Manajemen SDM	KM.4.3.C.06	Reward dan Punishment Pengelolaan SDM	Penghargaan bagi PNS atas Pengabdian selama XXX, XX, X	30.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000
46	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKM.4.3	Persentase Fakultas Yang Membangun Zona Integritas	KT.4.3.V	Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Peningkatan ZI/WBK	KT.4.3.V.08	Pembangunan Gedung dan Kontruksi Lainnya	Pengadaan Belanja Bangunan	180.000.000	25.000.000	40.000.000	45.000.000	55.000.000
47	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKM.4.3	Persentase Fakultas Yang Membangun Zona Integritas	KT.4.3.Y	Pemenuhan Kebutuhan Langganan Daya dan Jasa Rutin Peningkatan ZI/WBK	KT.4.3.Y.07	Perawatan Rutin Infrastruktur	Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung	335.000.000	290.000.000	295.000.000	300.000.000	310.000.000



48	SKT	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK.4.2	[IKK.4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 80	KT.4.3.Y	Pemenuhan Kebutuhan Langganan Daya dan Jasa Rutin Peningkatan ZI/WBK	KT.4.2.Y.10	Konsumsi dan Jamuan Tamu	Kebutuhan Operasional Kantor	191.189.362	169.559.000	170.700.000	175.500.000	180.800.000
		Jumlah								4.826.958.362	4.842.000.000	5.085.431.000	5.115.195.000	5.197.259.000



DAFTAR HADIR
Rapat Pimpinan Pembahasan Draft Renstra FH USK tahun 2025-2029
Pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Hari : Senin
Tanggal : 29 September 2025
Pukul : 9.30 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 FH USK

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Dinas	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum. 196504051991021001	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Dekan	
2	Prof. Dr. Efendi, S.H., M.Si 196712071993031002	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Wakil Dekan Akademik	
3	Dr. Sri Walny Rahayu, S.H.M.Hum 196806141994032002	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan	
4	Syamsul Bahri, S.H.I., M.A. 197911152008121001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan	
5	Dr. Muazzin, S.H., M.H. 197002081998021001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Kepala Departemen	
6	Khairani, S.H, M.Hum 196703221993032001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Sekretaris Departemen	


Dekan

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum
NIP 196504051991021001

